



NASIONAL

Forum BEM DIY Beri Tenggat 7 Hari, Desak Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

Oleh Redaksi • 12 Okt, 23.22 WIB



BANDA ACEH - Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM DIY) mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam agar tuntutan yang disampaikan dalam konferensi pers di Yogyakarta, Senin (12/10/2026), didengar dan ditindaklanjuti.

Forum BEM DIY menyatakan akan menggalang gerakan aksi nasional apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons. Mereka bahkan menyatakan bahwa Gibran akan diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden jika tuntutan itu tidak dipenuhi dalam tenggat yang ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “#REPUBLIKKORUPTOR: Bangun Persatuan, Rebut Daulat

Rakyat”. Dalam kesempatan itu, Forum BEM DIY didampingi tim hukum dari Kantor Hukum HAM & Associates.

Forum BEM DIY menyebut seruan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, dan penegakan hukum.

Mereka menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan sekadar bahan diskusi elite Politik di

Jakarta, melainkan persoalan yang menurut mereka harus segera ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang berwenang.

Salah satu dasar yang dikemukakan Forum BEM DIY adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mereka sebut ...

Selengkapnya di halaman 2 »

ACEH

Syech Muharram: Jangan Sampai Anak Aceh Tak Bisa Berbahasa Aceh



BANDA ACEH, KOTA JANTHO — Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian bahasa Aceh agar tidak kehilangan tempat di tengah kehidupan gene-

rasi muda. Menurutnya, bahasa daerah merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya yang perlu dijaga bersama.

Selengkapnya di halaman 19 »

NASIONAL

Gatot Nurmantyo Bongkar Warisan Jokowi, Revisi UU KPK hingga Pajak



BANDA ACEH - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melontarkan kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK pada era Presiden Joko Widodo. Ia menyebut perubahan aturan

komisi antirasuah itu sebagai “senjata ampuh untuk perang kognitif” yang didesain Jokowi.

Selengkapnya di halaman 3 »

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	19
INTERNASIONAL	21
Aneka Berita	23

NASIONAL

Jika Gibran Tak Mundur dalam 30 Hari, FKDI Desak DPR-MPR Mulai Proses Pemakzulan



BANDA ACEH - DPR dan MPR diminta mengambil langkah terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila ia tidak mengundurkan diri dalam waktu 30 hari. Desakan itu disampaikan Forum Komunikasi Diaspora

Indonesia (FKDI) melalui surat aspirasi yang juga meminta Gibran menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Selengkapnya di halaman 2 »

EKONOMI

DKP Aceh dan USK Jajaki Kolaborasi Hilirisasi Industri Pengolahan Ikan



BANDA ACEH - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh bersama Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Syiah Kuala (USK) mendorong penguatan hilirisasi industri pengolahan hasil perikanan melalui inovasi produk,

penerapan mekanisasi, dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan kuliah tamu yang diikuti mahasiswa Teknik Industri ...

Selengkapnya di halaman 23 »

NASIONAL

Bidik Segmen SUV Keluarga, Mitsubishi Benamkan Fitur Ini pada Destinator



BANDA ACEH - Pasar sport utility vehicle (SUV) di Indonesia menjadi salah satu segmen yang menarik perhatian pasar otomotif. Kendaraan jenis ini menawarkan kombinasi desain lebih sporty, posisi duduk lebih tinggi, serta fleksibilitas untuk menunjang mobilitas harian serta perjalanan bersama keluarga.

Selengkapnya di halaman 4 »

OPINI

Apa Urgensinya Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?



Oleh: Tarmidzi Yusuf, ((Kolumnis))

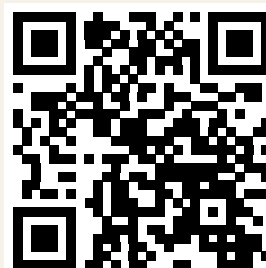
PA iya Anies Baswedan mau jadi menteri Prabowo? Pertanyaan ini muncul setelah mantan relawan Anies Baswedan yang saat ini jadi Juru Bicara Pemerintahan Prabowo, Syahganda Nainggolan mendorong Anies Baswedan menerima jika ada tawaran jadi menteri Prabowo.

Selengkapnya di halaman 24 »

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

36 BERITA

NASIONAL

Forum BEM DIY Beri Tenggat 7 Hari, Desak Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

Oleh Redaksi · 12 Okt, 23.22 WIB



BANDA ACEH - Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM DIY) mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam agar tuntutan yang disampaikan dalam konferensi pers di Yogyakarta, Senin (12/10/2026), didengar dan ditindaklanjuti.

Forum BEM DIY menyatakan akan menggalang gerakan aksi nasional apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons. Mereka bahkan menyatakan bahwa Gibran diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden jika tuntutan itu tidak dipenuhi dalam tenggat yang ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “#REPUBLIKKORUPTOR: Bangun Persatuan, Rebut Daulat Rakyat”. Dalam kesempatan itu, Forum BEM DIY didampingi tim hukum dari Kantor Hukum HAM & Associates.

Forum BEM DIY menyebut seruan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konst-

tusional untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, dan penegakan hukum.

Mereka menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan sekadar bahan diskusi elite Politik di Jakarta, melainkan persoalan yang menurut mereka harus segera ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang berwenang.

Salah satu dasar yang dikemukakan Forum BEM DIY adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mereka sebut sebagai Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Dalam pernyataan tertulisnya, Forum BEM DIY mengutip bagian putusan yang menyebutkan bahwa Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.

Forum BEM DIY juga menyoroti penilaian MK terhadap proses verifikasi persyaratan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Menurut mereka, putusan ter-

sebut menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban penyelenggara pemilu dan konsekuensi hukum terhadap persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

“Fakta persidangan tersebut harus disikapi dan ditindaklanjuti. Jangan diam,” demikian sikap Forum BEM DIY dalam pernyataan konferensi persnya.

Mereka mempertanyakan tindak lanjut yang semestinya dilakukan oleh DPR RI, MPR RI, serta lembaga negara lain sesuai kewenangannya. Forum BEM DIY juga meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan politik, tetapi diproses melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku.

Meski demikian, penilaian mengenai pemenuhan syarat pencalonan, tanggung jawab pihak terkait, dan konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus merujuk pada bunyi lengkap putusan MK serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mendesak Gibran mundur, Forum BEM DIY menyampaikan sepuluh tuntutan

yang ditujukan kepada sejumlah lembaga negara.

Mereka mendesak seluruh ketua umum partai politik menginstruksikan kadernya di DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dan memproses temuan MK melalui mekanisme pidana, etik, maupun politik ketatanegaraan sesuai kewenangan masing-masing.

Forum BEM DIY juga meminta DPR RI, MPR RI, dan lembaga berwenang lainnya menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden secara terbuka.

Tuntutan berikutnya ditujukan kepada pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Mereka meminta Presiden dan DPR RI segera memberhentikan seluruh komisioner KPU RI serta mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa pengaduan yang telah diterima dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Jika Gibran Tak Mundur dalam 30 Hari, FKDI Desak DPR-MPR Mulai Proses Pemakzulan

Oleh Redaksi · 12 Okt, 23.27 WIB



BANDA ACEH - DPR dan MPR diminta mengambil langkah terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila ia tidak mengundurkan diri dalam waktu 30 hari. Desakan itu disampaikan Forum Komunikasi Diaspora Indonesia (FKDI) melalui surat aspirasi yang juga meminta Gibran menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Surat bernomor 001/FKDI/X/2026 tersebut ditujukan kepada Ketua DPR, Ketua MPR, Presiden, dan Wakil Presiden. Dokumen itu ditandatangani Ketua FKDI Eko Raharjo dan Sekretaris Jenderal FKDI Agus Yunanto.

Dalam surat tersebut, FKDI menetapkan dua tuntutan utama. Pertama, Gibran diminta meminta maaf dan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kedua, jika tuntutan pengunduran diri tidak dipenuhi dalam 30 hari, FKDI mendesak pimpinan DPR dan MPR memulai proses pemakzulan.

“Apabila dalam waktu 30 hari Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Wapres, maka FKDI mendesak pimpinan DPR dan MPR untuk memulai proses pemakzulan terhadap yang bersangkutan,” demikian bunyi surat tersebut, dikutip Minggu (11/10/2026).

FKDI mendasarkan tuntutannya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Gibran. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Organisasi tersebut menilai temuan dalam putusan itu menjadi dasar untuk mempertanyakan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai calon wakil presiden

maupun pejabat yang telah dilantik. Atas dasar penilaian tersebut, FKDI meminta lembaga negara menindaklanjuti persoalan itu melalui mekanisme konstitusional.

Namun, MK dalam amar putusannya menyatakan permohonan yang diajukan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Karena itu, putusan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai keputusan MK yang secara langsung menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat atau memerintahkan DPR dan MPR memulai pemakzulan.

Dalam suratnya, FKDI merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional terkait pemberhentian presiden dan wakil presiden. Meski demikian, proses pemakzulan memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri, sehingga desakan organisasi masyarakat tidak otomatis memulai atau menentukan hasil proses tersebut.

FKDI juga menjelaskan alasan mereka memprioritaskan pengunduran diri dibandingkan proses pemakzulan. Organisasi itu menyebut akhlak dan martabat kebangsaan yang berlandaskan Pancasila sebagai pertimbangan utama dalam menyampaikan aspirasi tersebut.

Selain alasan moral, FKDI menilai permintaan maaf dan pengunduran diri dapat menghemat waktu serta biaya yang diperlukan apabila persoalan tersebut berlanjut melalui proses di DPR dan MPR. Pandangan itu disampaikan sebagai bagian dari argumentasi organisasi dalam suratnya.

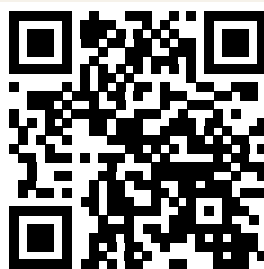
“Di samping itu, pernyataan permintaan maaf dan pengunduran diri dari Wapres Gibran Rakabuming Raka selain akan bisa meringankan sanksi dari kesalahan yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan, juga menghemat biaya dan waktu yang berharga dari lembaga DPR dan MPR,” lanjut FKDI.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

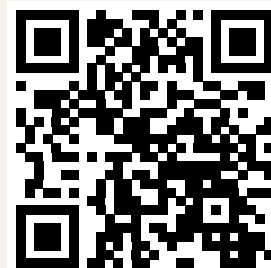
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Gatot Nurmantyo Bongkar Warisan Jokowi, Revisi UU KPK hingga Pajak

Oleh Redaksi · 12 Okt, 23.48 WIB



BANDA ACEH - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melontarkan kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK pada era Presiden Joko Widodo. Ia menyebut perubahan aturan komisi antirasuah itu sebagai “senjata ampuh untuk perang kognitif” yang didesain Jokowi.

Gatot menyampaikan sorotan tersebut dalam diskusi bersama sejumlah tokoh nasional yang ditayangkan melalui kanal YouTube Fight For Liberty & Democracy.

“Ini senjata ampuh untuk perang kognitif yang didesain Pak Jokowi. Saya sebut aja langsung Pak Jokowi,” kata Gatot dalam tayangan tersebut, dikutip Inilah.com Senin (12/10/2026).

Gatot mempersoalkan perubahan posisi kelembagaan dan mekanisme kerja KPK setelah revisi pada 2019. Menurut dia, perubahan itu berdampak terhadap independensi KPK dalam memberantas korupsi.

Revisi UU KPK disahkan DPR pada 17 September 2019 dan

diundangkan pada 17 Oktober 2019. Salah satu perubahannya adalah menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, meski undang-undang tetap menyatakan lembaga tersebut independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Bikin KPK Dikebiri

Gatot turut menyoroti mekanisme pengawasan penyadapan dan perubahan tata kelola internal KPK. Ia menilai perubahan tersebut berpotensi mempersempit keleluasaan komisi antirasuah dalam menangani perkara.

Dalam perkembangannya, kewenangan Dewan Pengawas terkait izin penyadapan telah berubah setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 4 Mei 2021. Dewas menerima pemberitahuan penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan dari penyidik, bukan lagi memberikan izin.

Sorotan Gatot terhadap kebijakan pemberantasan korupsi juga menjangkau pembentukan Korps

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortastipidkor di lingkungan Polri.

Korps tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, menjelang berakhirnya masa jabatan.

Gatot mempertanyakan keputusan pengambilan keputusan strategis pada penghujung pemerintahan. Menurut dia, dampak keputusan tersebut akan ikut ditanggung pemerintahan berikutnya.

Kortastipidkor sendiri bertugas membantu Kapolri dalam pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan korupsi, termasuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi serta penelusuran dan pengamanan aset.

Dari UU KPK hingga Beban Ekonomi

Selain urusan pemberantasan korupsi, Gatot menyinggung kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, utang negara,

maraknya judi online, dan pemutusan hubungan kerja.

Ia menilai persoalan tersebut berpotensi menambah beban pemerintahan saat ini. Dampaknya, menurut Gatot, juga dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun, untuk barang nonmewah dan jasa, mekanisme penghitungan menggunakan dasar pengenaan pajak nilai lain membuat beban PPN secara umum tetap setara 11 persen.

Melalui sorotan terhadap korupsi hingga ekonomi, Gatot menilai sejumlah kebijakan era Jokowi masih menyisakan persoalan bagi pemerintahan saat ini. Revisi UU KPK menjadi salah satu kebijakan yang secara khusus ia persoalkan.

NASIONAL

Hasyim Munafik!, Ahmad Doli Kurnia: Komisaris BUMN Hadiah dari Siapa?

Oleh Redaksi · 12 Okt, 20.27 WIB



Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia melontarkan kritik keras terhadap mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan menyeret jabatan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang kini diembannya ke tengah polemik dugaan penyelundupan pasal dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Doli tidak hanya membantah sindiran Hasyim yang menyebut dirinya lupa dan munafik. Ia juga mempertanyakan bagaimana Hasyim memperoleh jabatan komisaris tersebut, siapa pihak yang mengusulkan, serta apa dasar penunjukannya.

Pernyataan itu disampaikan Doli di kompleks DPR, Jakarta, Senin (12/10/2026). Ia bahkan melontarkan pertanyaan bernada sindiran mengenai kemungkinan jabatan tersebut diberikan sebagai hadiah.

“Sekarang sedang menikmati kemunafikan itu. Saya tanya dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN. Coba tanya sama dia itu dapat dari mana komisaris itu, hadiah dari siapa? Gitu kan, dapat komisaris itu,” tegas Doli.

Pernyataan tersebut memperluas polemik yang semula berpusat pada dugaan penyelundupan pasal dalam aturan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Kini, perdebatan juga merambah transparansi pengangkatan mantan penyelenggara pemilu ke jabatan komisaris perusahaan pelat merah.

Doli menilai Hasyim perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai jabatan yang kini didudukinya. Namun, pertanyaan tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran dalam proses pengangkatan. Mekanisme seleksi, pihak pengusul, kualifikasi, dan dasar penunjukan tetap perlu diperiksa berdasarkan dokumen serta keterangan resmi.

Doli Ungkit Dua Kali Pemberhentian Hasyim

Serangan verbal Doli bermula dari pernyataan Hasyim yang menyindir dirinya dan Arsul Sani,

mantan anggota Komisi II DPR yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan kalimat, “lupa boleh, munafik jangan.”

Doli membalas dengan mengungkit pemberhentian Hasyim dari jabatan Ketua KPU. Ia menilai sindiran tersebut justru berbalik kepada pihak yang melontarkannya.

“Jadi Saudara Hasyim itu sebenarnya sedang membicarakan atau menjelaskan tentang dirinya sendiri ya. Dia menggunakan kata ‘lupa’ dan ‘munafik’. Dia lupa dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai Ketua KPU karena kemunafikannya gitu. Dan dia menikmati kemunafikan itu,” kata Doli.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian pribadi Doli dalam persetujuan terbuka dengan Hasyim. Di luar adu sindiran itu, persoalan yang menjadi pangkal polemik tetap membutuhkan pembuktian melalui dokumen resmi dan penelusuran proses pembentukan PKPU 19/2023.

Jabatan Komisaris BUMN Ikut Dipersoalkan

Sorotan Doli terhadap jabatan komisaris Hasyim menjadi dimensi baru dalam polemik tersebut. Ia mempertanyakan relevansi latar belakang Hasyim dengan bidang usaha perusahaan tempatnya menjabat, yang menurut pengetahuan Doli bergerak di sektor perkebunan.

Doli juga menuntut kejelasan mengenai asal-usul penunjukan tersebut. Siapa yang mengusulkan Hasyim? Apa pertimbangan yang digunakan? Bagaimana proses seleksinya berlangsung?

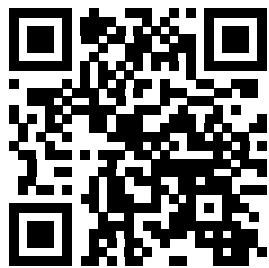
Pertanyaan-pertanyaan itu menempatkan transparansi pengangkatan komisaris BUMN sebagai isu yang perlu dijelaskan kepada publik. Meski demikian, jabatan komisaris yang diemban Hasyim tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya konflik kepentingan ataupun pelanggaran. Penilaian tersebut memerlukan bukti dan informasi mengenai proses pengangkatannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

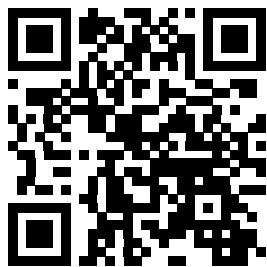
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bidik Segmen SUV Keluarga, Mitsubishi Benamkan Fitur Ini pada Destinator

Oleh Redaksi · 12 Okt, 18.12 WIB



BANDA ACEH - Pasar sport utility vehicle (SUV) di Indonesia menjadi salah satu segmen yang menarik perhatian pasar otomotif. Kendaraan jenis ini menawarkan kombinasi desain lebih sporty, posisi duduk lebih tinggi, serta fleksibilitas untuk menunjang mobilitas harian serta perjalanan bersama keluarga.

Perkembangan SUV ditandai dengan semakin beragamnya pilihan kendaraan, mulai dari SUV kompak untuk penggunaan di perkotaan hingga model berkapasitas tujuh penumpang. Kondisi tersebut membuat persaingan produsen tidak hanya bertumpu pada desain dan performa mesin, tetapi juga pada teknologi keselamatan, efisiensi, kenyamanan kabin, dan fitur konektivitas.

Menyikapi itu, Mitsubishi membenamkan teknologi keselamatan, kenyamanan kabin, dan mode berkendara pada Destinator untuk menyasar segmen SUV keluarga tujuh penumpang. Fitur yang disematkan mencakup sistem bantuan pengemudi, kamera 360 derajat,

hingga pengaturan suhu kabin yang menjangkau baris ketiga.

General Manager Marcomm and PR PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Intan Vidiyari mengatakan, respons masyarakat terhadap Destinator menjadi dorongan bagi Mitsubishi Motors untuk menghadirkan kendaraan yang relevan dengan kebutuhan mobilitas keluarga.

“Sejak pertama kali diperkenalkan, Mitsubishi Destinator langsung mencuri hati banyak orang, lewat desainnya yang gagah, kenyamanan yang berkelas, dan semangat petualangan di setiap detailnya. Antusiasme dan dukungan dari masyarakat menjadi inspirasi bagi Mitsubishi Motors untuk berbagi lebih dari sekadar kisah tentang sebuah mobil, tetapi tentang perjalanan hidup yang kita jalani bersama, yang membentuk diri kita,” kata Intan, dalam konferensi pers, belum ini.

Mitsubishi Destinator memiliki dimensi panjang 4.680 mm, lebar 1.840 mm, dan tinggi 1.780 mm.

Mobil ini mengusung konfigurasi tiga baris kursi untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas keluarga, baik untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Dari sisi interior, Mitsubishi Destinator menggunakan material lembut pada panel instrumen. Pada varian Ultimate, tersedia sejumlah fitur tambahan, seperti panoramic sunroof, ambient lighting, meja lipat di belakang kursi, serta sistem pendingin udara dual zone.

Sistem dual zone AC memungkinkan pengemudi dan penumpang depan mengatur suhu secara terpisah. Sementara itu, sistem pendingin dirancang menjangkau hingga baris ketiga untuk mendukung kenyamanan penumpang di seluruh kabin.

Pereli sekaligus Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia Rifat Sungkar menyoroti ruang kabin sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih SUV keluarga. Menurutnya, posisi duduk yang tinggi

harus diimbangi dengan ruang kepala dan ruang kaki memadai.

“SUV itu travel suspension-nya lebih panjang, ground clearance-nya lebih tinggi, dan badannya juga lebih bulky. Sekarang, orang selalu mencari mobil yang posisi duduknya lebih tinggi. Nah, Destinator itu punya kelebihan posisi duduknya tinggi, tapi yang paling enak adalah headroom-nya yang lega,” ujar Rifat.

Teknologi Keselamatan

Pada sektor keselamatan, Mitsubishi Destinator dilengkapi paket teknologi Diamond Sense yang mencakup sejumlah sistem bantuan pengemudi atau advanced driver assistance systems (ADAS). Fitur tersebut meliputi Forward Collision Mitigation (FCM) untuk membantu mengurangi risiko tabrakan dari depan, Leading Car Departure Notification (LCDN) sebagai pemberitahuan ketika kendaraan di depan mulai bergerak, serta Rear ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Pasal Selundupan untuk Loloskan Gibran Tak Pernah Dibahas DPR

Oleh Redaksi · 12 Okt, 17.51 WIB



BANDA ACEH -Ditemukan pasal selundupan dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 18 ayat (3) yang menjadi kontroversi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024, justru tidak pernah dibahas di Komisi II DPR.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, ketentuan tersebut tidak tercantum dalam draf resmi PKPU yang diterima Komisi II DPR. Pasal serupa juga tidak ditemukan dalam dokumen yang dipegang peserta uji publik sebelum peraturan itu diterbitkan.

Ia mengatakan, terdapat surat yang masuk dalam proses tersebut, tetapi substansi pasal yang dipersoalkan tidak ditampilkan dalam presentasi pembahasan bersama DPR.

“Kami tidak pernah membahas itu, ya (Pasal 18 ayat 3 PKPU). Draft yang kami terima juga tidak ada itunya, ya, yang resmi kami terima, gitu,” kata Doli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Politikus Partai Golkar itu juga meluruskan dugaan bahwa pasal tersebut baru disisipkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Doli mengaku semula menduga ketentuan itu dimasukkan setelah putusan MK. Namun, informasi yang diperolehnya menunjukkan pasal tersebut sudah ada sebelum putusan dibacakan.

“Waktu itu dugaan saya, pasal ini dimasukkan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Ternyata sebelum putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Doli.

Meski demikian, Doli belum mengungkap pihak maupun tahapan yang memungkinkan ketentuan tersebut masuk ke dalam rancangan PKPU. Ia menyatakan akan menjelaskan persoalan itu pada waktu dan forum yang tepat.

“Nah, masuknya di mana? Nanti saya jelaskan, ya, di waktu dan ruang yang tepat,” kata Doli.

Doli menjelaskan, penyusunan PKPU merupakan kewenangan KPU, sedangkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) menjadi kewenangan Bawaslu.

DPR bersama pemerintah bertugas membentuk undang-undang, sementara peraturan penyelenggara pemilu merupakan aturan turunan yang harus selaras dengan ketentuan di atasnya.

“Kami di DPR ini adalah pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah,” kata Doli.

Menurut Doli, rancangan PKPU dan Perbawaslu wajib dikonsultasikan dengan DPR sebelum ditetapkan. Namun, konsultasi tersebut bukan berarti DPR mengambil alih kewenangan KPU atau Bawaslu dalam menyusun peraturan.

“Kenapa pakai kata konsultasi? Karena sebenarnya mereka itu adalah kewenangan mereka,” kata Doli.

Mantan Ketua Komisi II DPR itu menekankan pentingnya uji publik untuk memastikan rancangan peraturan diketahui masyarakat dan mendapat masukan sebelum memasuki tahap konsultasi dengan DPR.

Ia mengaku telah memeriksa dokumen yang dimiliki DPR sekaligus mengonfirmasikannya kepada sejumlah pihak yang mengikuti uji publik. Hasilnya, pasal yang kini dipersoalkan tidak ditemukan dalam dokumen yang mereka pegang.

“Nah jadi data yang kami punya dengan apa yang juga dipegang oleh teman-teman atau masyarakat yang ikut uji publik itu enggak ada pasal itu,” kata Doli.

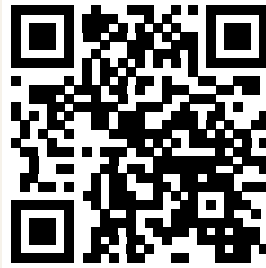
Doli menambahkan, DPR turut memeriksa keselarasan rancangan peraturan dengan ketentuan lain. Dalam proses konsultasi, DPR juga membutuhkan masukan dari Bawaslu, pemerintah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

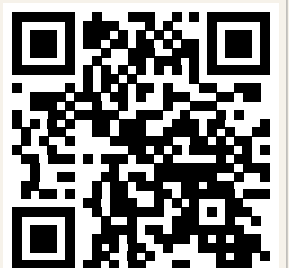
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

‘Pernyataan Rocky Gerung Ungkap Sinyal Kubu Prabowo Ingin Gibran Mundur’

Oleh Redaksi · 12 Okt, 16.01 WIB



BANDA ACEH - Pernyataan Rocky Gerung yang menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri memunculkan pertanyaan Politik baru. Apakah pernyataan tersebut murni pandangan pribadi Rocky, atau mencerminkan kegelisahan yang berkembang di lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto?

Pertanyaan itu disampaikan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, saat menanggapi pernyataan Rocky mengenai potensi kemarahan publik terkait polemik ijazah Gibran.

Melalui unggahannya di media sosial, Henri mempertanyakan apakah benar telah terjadi akumulasi kemarahan masyarakat yang berpotensi memicu amuk massa apabila Gibran tidak mengundurkan diri dari jabatannya.

“Apa benar sekarang sudah terjadi akumulasi kemarahan publik yang bisa memunculkan amuk massa, jika Gibran tidak mengundurkan diri?” tulis Henri, Senin (12/10/2026).

Henri menyoroti posisi Rocky yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026.

Posisi tersebut membuat pernyataan Rocky menarik perhatian. Sebab, pandangan yang disampaikan seseorang di lingkungan penasihat presiden dapat memunculkan pertanyaan tentang hubungannya dengan arah kebijakan dan pertimbangan politik pemerintah.

Henri mempertanyakan apakah pandangan Rocky akan didengarkan Presiden Prabowo, menjadi aspirasi di lingkungan Istana, atau justru merupakan pendapat pribadi Rocky sebagai akademisi yang kini berada di lingkaran kekuasaan.

Pertanyaan ini menjadi penting karena Rocky selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengamat yang kritis terhadap kekuasaan. Kini, setelah berada di lingkungan pemerintahan, pernyataannya mengenai Gibran berpotensi dibaca dengan sudut pandang politik yang berbeda.

Rocky sendiri pernah menyatakan bahwa keputusannya masuk

ke lingkungan pemerintahan bertujuan agar pemikirannya dapat lebih cepat sampai kepada Presiden Prabowo. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap pernyataannya merupakan sikap resmi Presiden.

Karena itu, pertanyaan Henri mengenai hubungan antara pandangan Rocky dan sikap Prabowo masih memerlukan jawaban yang jelas dari pihak terkait.

Henri juga mengajukan pertanyaan yang lebih jauh. Menurutnya, pernyataan Rocky dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kubu Prabowo menginginkan Gibran bersedia mundur dari pemerintahan.

Jika tafsir tersebut benar, situasinya berpotensi menandai perubahan hubungan politik antara Prabowo dan keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selama ini, hubungan Prabowo dan Jokowi menjadi salah satu faktor penting dalam peta politik nasional. Gibran sendiri merupakan putra Jokowi yang terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo.

Pengunduran diri Gibran, apabila benar-benar terjadi, tentu akan membawa konsekuensi politik besar. Langkah itu bukan hanya menyangkut keberlanjutan pemerintahan, melainkan juga dapat memengaruhi hubungan antarkekuatan politik yang selama ini berada dalam satu barisan.

Namun, perlu dibedakan antara penafsiran atas pernyataan Rocky dan bukti adanya keputusan politik dari Prabowo. Hingga ada pernyataan resmi yang mendukungnya, anggapan bahwa kubu Prabowo menginginkan Gibran mundur tetap merupakan dugaan yang perlu diuji.

Henri kemudian mempertanyakan apakah kubu Jokowi siap menerima saran atau nasihat dari Rocky, yang kini menjadi anggota Wantimpres.

Pertanyaan itu menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni kemungkinan perubahan keseimbangan politik antara kelompok pendukung Prabowo dan kelompok yang selama ini dekat dengan Jokowi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Polemik Gibran Memanas, Ahmad Doli Kurnia Balas Sindiran Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari

Oleh Redaksi · 12 Okt, 20.14 WIB



BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung merespons pernyataan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari yang menyindirnya dengan kalimat “lupa boleh, munafik jangan” terkait polemik aturan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Doli menilai sindiran tersebut justru menggambarkan diri Hasyim. Politisi Partai Golkar itu juga menyinggung pemberhentian Hasyim dari jabatan Ketua KPU serta penunjukannya sebagai komisaris di salah satu badan usaha milik negara (BUMN) sektor perkebunan.

“Jadi, Saudara Hasyim itu sebenarnya sedang membicarakan atau menjelaskan tentang dirinya sendiri, ya. Dia menggunakan kata lupa dan munafik, ya,” ujar Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Doli kemudian menyinggung pemberhentian Hasyim dari jabatan Ketua KPU. Dia mempertanyakan penunjukan tersebut dan menyampaikan kritik keras terhadap mantan penyelenggara pemilu itu.

“Dia lupa, dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai Ketua KPU karena kemunafikannya, gitu ya, dan dia menikmati kemunafikan itu. Sekarang sedang menikmati kemunafikan itu,” tuturnya.

Tak berhenti di situ, Doli juga mempertanyakan dasar pengangkatan Hasyim sebagai komisaris BUMN di sektor perkebunan. Dia meminta Hasyim menjelaskan proses dan pertimbangan di balik penunjukan tersebut.

“Coba tanya sama dia, itu dia tuh dapat dari mana komisaris itu?

Hadiah dari siapa? Gitu kan, dapat komisaris itu? Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya yang berkaitan dengan soal perkebunan. Gitu loh. Ya dia harus jelaskan itu. Kok bisa dia dapat posisi jadi komisaris itu, ya kan? Nah, ini yang harus dicari menurut saya,” kata Doli.

Doli mengaku sebelumnya memilih tidak memperpanjang polemik tersebut. Dia menyebut memiliki sejumlah data, tetapi tidak berniat mengungkapkannya kepada publik.

Namun, setelah Hasyim menyebutkan namanya secara langsung, Doli merasa perlu memberikan tanggapan.

“Cuman karena ini sudah nyebut nama saya pribadi, ya saya harus jelaskan. Kalau memang mau dibuka, ya kita buka. Gitu, ya,” ucapnya.

Berawal dari Polemik Aturan Pencalonan Gibran

Perseteruan tersebut berkaitan dengan polemik Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.

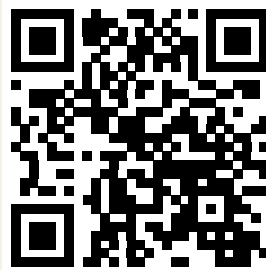
Ketentuan itu sebelumnya menjadi sorotan karena dinilai membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Dalam polemik tersebut, aturan itu bahkan disebut sebagai pasal selundupan.

Pernyataan Doli menjadi respons atas sindiran Hasyim sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai aturan pencalonan pada Pemilu 2024 dan penunjukan mantan Ketua KPU tersebut sebagai komisaris BUMN

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mahfud MD: MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, Persoalan Bisa Lanjut ke Lembaga Berwenang

Oleh Redaksi · 12 Okt, 13:39 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tidak ditemukannya bukti ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan ijazah SMA atau sederajat.

Mahfud mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya, surat keterangan penyetaraan yang ditemukan tidak sama dengan ijazah yang membuktikan kelulusan pendidikan setingkat SMA.

“Pada saat mendaftar Gibran itu tidak memenuhi syarat, karena dia mengatakan tidak menemukan ijazah atau yang disetarakan,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang seperti dikutip Holopis.com, Senin (12/10/2026).

“Yang ditemukan itu kan hanya surat keterangan bahwa itu disetarakan dengan keahlian, bukan disetarakan dengan ijazah. Nah, oleh sebab itu ya tidak memenuhi syarat. Oleh karena tidak memenuhi syarat maka ijazah dianggap tidak ada,” sambungnya.

Mahfud menyebut pandangannya tersebut merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Mahfud menegaskan, bagian pertimbangan hukum yang dimak-

sud perlu dibaca secara utuh, bukan hanya mengambil satu frasa yang berada di tengah uraian putusan.

“Ingat, kalimat terakhir dari itu, itu kan satu frasa yang ada di tengah, di halaman 75 dan 76. Di bagian terakhir itu frasa itu, itu adalah pendapat Mahkamah nomor 3.6 itu tadi,” ujarnya.

Menurut Mahfud, bagian penting dari pertimbangan tersebut adalah penjelasan bahwa persoalan ketiadaan dokumen ijazah atau dokumen pendidikan yang dapat disetarakan dengan SMA menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan pemenuhan syarat calon presiden maupun wakil presiden.

Ia menilai, MK telah menjelaskan batas kewenangannya dalam perkara tersebut. Mahkamah tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden, tetapi menyerahkan persoalan terkait pemenuhan syarat pencalonan kepada lembaga yang berwenang.

“Nah, 3.6 kalimat terakhir itu, oleh karena tidak adanya ijazah SMA dan yang disetarakan, maka Mahkamah menyerahkan kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya,” kata Mahfud.

“Sudah jelas, ini Mahkamah menyatakan tidak ada ijazah, tapi Mahkamah tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa melakukan penghukuman atau membatalkan, apa istilahnya mendiskualifikasi Gibran. Kan itu bukan kewenangan Mahkamah. Tapi ini faktanya, silakan ke pengadilan,” lanjutnya.

Sebagaimana tertuang dalam keterangan resmi MK, mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan yang memenuhi kriteria tersebut. Meski demikian, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai wakil presiden melalui perkara yang diajukan para pemohon

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Ruben Onsu Laporkan Akun IG Sarwendah, Usia Bongkar VC Sesama Pria

Oleh Redaksi · 12 Okt, 17:18 WIB



BANDA ACEH - Ruben Onsu lapor polisi usai Sarwendah mengunggah video dirinya video call dengan seorang pria. Pihak Ruben Onsu menegaskan bahwa terlapor dalam perkara ini pemilik akun Instagram @sarwendah29 yang selama ini diketahui sosial media milik Sarwendah.

Pelaporan tersebut dilayangkan Ruben Onsu pada Minggu (11/10/2026) sore hari. Ruben Onsu melaporkan dugaan tindak pencemaran nama baik.

“Dengan nomor laporan STTLP/B/7634, ini keterkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik,” ujar kuasa hukum Minola Sebayang ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2026).

Minola Sebayang menerangkan dugaan tindak pencemaran nama baik yang dilaporkan Ruben Onsu. Laporan tersebut berkaitan dengan perekaman tanpa izin yang diduga adanya editan.

“Tindakan yang seperti yang saya katakan, melakukan perekaman tanpa izin, dan kemudian menggunakan rekaman video call tersebut dengan cara yang melawan hukum,” terangnya.

“Apa cara melawan hukumnya itu? Patut diduga, menurut klien kami, ada editan. Ya, editannya di bagian mana? Itu nanti akan dibuktikan oleh pihak kepolisian dan juga akan disampaikan oleh klien kami pada waktu BAP,” terangnya.

Selain itu, penyebaran video tersebut menjadi sesuatu yang disoroti Ruben Onsu. Video itu sendiri disebarkan akun Instagram @sarwendah29 yang selama ini diketahui milik Sarwendah.

“Dan di luar itu, tentu, ketika tanpa izin kita mempublikasikan video percakapan seseorang untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang tersebut, ini juga sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum mempublikasikan tanpa izin. Apalagi wajahnya di-blur, ya dan bermuatan sesuatu yang mencemarkan nama baik dan reputasi serta harga diri seseorang,” lanjutnya.

Terlapor dalam kasus ini yaitu pemilik akun @sarwendah29. Selain mengunggah video tersebut, pemilik akun yang disinyalir adalah Sarwendah juga diduga menambahkan narasi yang dapat menggiring opini.

“Terlapor yang dilaporkan adalah akun yang mem-posting, yang mempublikasikan tanpa hak tersebut. Ya, jadi ini yang kita laporkan. Akun IG (@sarwendah29) dan saya kira teman-teman juga melihat siapa yang melakukan pemostingan tersebut,” ujarnya.

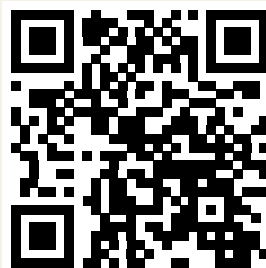
“Ya. Tentu dengan narasi-narasi yang seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan. Ya, justru kalau menurut pendapat kami, narasi-narasi yang tertulis yang dibuat dalam akun tersebut, itu justru membuktikan sebaliknya. Tentu yang bertanggung jawab adalah pemilik akun,” tutupnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ruben Onsu melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan Ruben Onsu usai Sarwendah membongkar video saat sang mantan suami melakukan video call dengan seorang pria.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

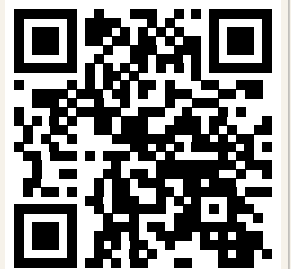
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Anies, Ganjar, Mahfud Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo, Kabinet Bayangan: Perselingkuhan Demokrasi!

Oleh Redaksi · 12 Okt, 10.51 WIB



BANDA ACEH – Usulan memasukkan Anies, Ganjar, dan Mahfud ke kabinet Prabowo menuai kritik keras. Heru Subagia menyebutnya sebagai perselingkuhan demokrasi yang berbahaya.

Wacana memasukkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik keras.

Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, menyebut usulan tersebut berpotensi mengancam keseimbangan demokrasi karena dinilai dapat mempersempit ruang oposisi dalam mengawasi kekuasaan.

Polemik ini mencuat setelah Syahganda Nainggolan mengusulkan agar ketiga tokoh yang pernah berada di kubu berbeda dalam Pilpres 2024 itu dirangkul untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, bagi Heru, gagasan tersebut bukan sekadar persoalan menambah kekuatan Politik pemerintah.

Ia mempertanyakan dampaknya terhadap efektivitas kabinet, efisiensi anggaran, serta keberadaan

kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Heru bahkan melontarkan tuduhan keras dengan menyebut usulan tersebut sebagai bentuk perselingkuhan demokrasi.

Ia menilai, memperluas koalisi tanpa mempertimbangkan fungsi oposisi justru berisiko melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.

“Usulan dari Syahganda yang juga sebagai kepala Bakom ini dianggap sebagai bagian provokasi yang sangat serius dan juga kekuatan kontraproduktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masalah efisiensi anggaran dan juga masalah penguatan-penguatan partai,” ujar Heru, Minggu (11/10/2026).

Heru menegaskan, sistem demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintahan yang kuat.

Keberadaan pihak di luar kekuasaan juga diperlukan untuk mengkritisi kebijakan dan memastikan pemerintah tetap menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.

Menurutnya, apabila seluruh kekuatan politik dirangkul ke dalam kabinet, fungsi oposisi berpotensi kehilangan ruang untuk bekerja secara maksimal.

Selain mengkritik usulan Syahganda, Heru menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia mengaku telah menyampaikan ultimatum kepada pemerintahan Prabowo agar tidak kembali melakukan perubahan komposisi kabinet.

“Saya ingin menggarisbawahi atas nama Parlemen Bayangan, Indonesia Pasti, sudah mengultimatum kepada pemerintahan Prabowo khususnya agar tidak melakukan reshuffle lagi,” katanya.

Heru juga menyoroti pentingnya prinsip check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menilai, pengawasan dari kelompok di luar kekuasaan merupakan bagian penting untuk menjaga demokrasi tetap berjalan.

“Menurut saya, Syahganda yang baru saja dilantik sebagai Bakom sudah melakukan kesalahan paling besar anti-demokrasi dan juga justru mendukung sebuah pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya menuju sebuah pemerintahan diktator,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Heru terhadap usulan yang disampaikan Syahganda,

bukan bukti bahwa pemerintahan Prabowo telah menjadi pemerintahan diktator.

Heru turut menyinggung pertemuan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD di Yogyakarta.

Ia menduga pertemuan tersebut mungkin memiliki dimensi politik yang lebih luas jika dikaitkan dengan gagasan memasukkan ketiganya ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Meski demikian, dugaan mengenai adanya penajakan politik itu belum membuktikan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana pembentukan kabinet.

“Jika dikoneksikan dengan apa ucapan Syahganda menginginkan Anies, Ganjar, dan Mahfud pada akhirnya masuk dalam sebuah kekuasaan Prabowo, ini semestinya harus dicurigai bahwa Anies juga sedang melakukan lobi-lobi politik, penajakan politik, dan juga konsolidasi politik sesama peserta Pemilu Pilpres 2024 kemarin,” ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Syahganda Minta Anies Masuk Kabinet Prabowo, Loyalis: Ditolak Melulu...

Oleh Redaksi · 12 Okt, 13.32 WIB



BANDA ACEH - Syahganda mendorong Anies masuk kabinet Prabowo, tetapi loyalisnya, Geisz Khalifa, mengungkapkan klaim tawaran Menlu yang disebut pernah ditolak Anies.

Wacana masuknya Anies Baswedan ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.

Kali ini, pernyataan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang mendorong Anies menjadi Menteri Pendidikan mendapat respons dari loyalis mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Geisz Khalifa.

Geisz mengungkapkan bahwa Anies disebut pernah dihubungi untuk mengisi posisi Menteri Luar Negeri pada awal pemerintahan Prabowo.

Namun, menurut Geisz, dirinya justru mendorong Anies agar menolak tawaran tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Geisz melalui akun X miliknya sebagai tanggapan atas usulan Syahganda yang meminta Anies tidak ragu bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

“Anies sejak awal sudah dihubungi untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Gue justru mendorong dia untuk menolak,” tulis Geisz dalam unggahannya.

Klaim tersebut menambah perhatian publik terhadap kemungkinan keterlibatan Anies dalam pemerintahan Prabowo.

Meski demikian, informasi mengenai komunikasi untuk posisi Menteri Luar Negeri itu masih berdasarkan keterangan Geisz dan belum disertai konfirmasi independen dalam informasi yang tersedia.

Geisz juga menanggapi komentar sejumlah pihak yang mempertanyakan siapa yang menawarkan jabatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pernyataannya merupakan respons atas ucapan Syahganda berdasarkan informasi yang diketahuinya.

“Gue cuma menjawab omongan Syahganda melalui fakta yg gue ketahui,” tulis Geisz dalam unggahan yang sama.

Sementara itu, Syahganda sebelumnya secara terbuka menyampaikan dukungannya agar Anies

bersedia masuk kabinet pemerintahan Prabowo

Ia menilai mantan calon presiden pada Pilpres 2024 tersebut cocok menduduki posisi Menteri Pendidikan.

“Saya mendorong dia (Anies) untuk jadi Menteri Pendidikan. Cocok, Anies cocok,” kata Syahganda dalam tayangan kanal YouTube Total Politik, Minggu (11/10/2026).

Syahganda berpandangan bahwa perbedaan dan persaingan politik pada Pilpres 2024 tidak seharusnya menjadi penghalang bagi tokoh-tokoh nasional untuk bekerja sama demi kepentingan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa Anies dan Prabowo memiliki riwayat keterkaitan politik, terutama saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Syahganda, pengalaman tersebut menjadi bagian dari alasan mengapa Anies dinilai layak mempertimbangkan tawaran pengabdian di pemerintahan.

Syahganda turut mencontohkan langkah Prabowo yang bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan setelah bersaing dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Baginya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa rivalitas politik dapat diikuti dengan kerja sama pemerintahan.

Perbedaan pernyataan Syahganda dan Geisz kini menjadi perhatian.

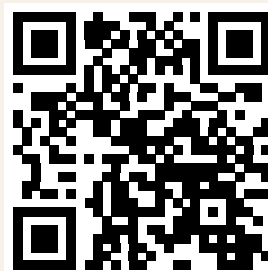
Syahganda mendorong Anies menerima peluang menjadi Menteri Pendidikan, sedangkan Geisz mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyarankan Anies menolak posisi Menteri Luar Negeri yang, menurut klaimnya, sempat ditawarkan pada awal pemerintahan Prabowo.

Hingga informasi yang tersedia dalam pemberitaan tersebut, belum ada keterangan langsung dari Anies Baswedan yang mengonfirmasi klaim mengenai tawaran jabatan Menteri Luar Negeri maupun sikapnya terhadap usulan menjadi Menteri Pendidikan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

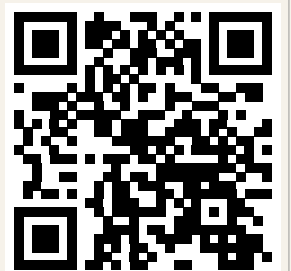
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Bantah Ada Pasal Selundupan untuk Pencalonan Gibran: Kami Tidak Ngawur

Oleh Redaksi · 12 Okt, 08.53 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah tuduhan KPU menyelundupkan norma persyaratan pendidikan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dia menegaskan, rumusan norma tersebut merupakan hasil masukan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga.

Pernyataan Hasyim sekaligus merespons klaim Ketua Komisi II DPR periode 2019-2024 Ahmad Doli Kurnia yang mengaku tidak membahas norma persyaratan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Hasyim menyebut, saat norma tersebut dirumuskan, belum diketahui siapa saja yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

"Norma dalam pasal tersebut sudah melalui serangkaian proses yaitu hasil uji publik hingga hasil

konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, hasil konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat kerja RDP, dan hasil harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum. Secara prosedural semua tahapan proses pembentukan PKPU telah ditempuh," ujar Hasyim dalam keterangan tertulis, dikutip Senin(12/10/2026).

Hasyim menjelaskan, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang diundangkan pada 13 Oktober 2023 memuat sejumlah ketentuan terkait persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf r, aturan tersebut menyebutkan calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) huruf m mengatur dokumen persyaratan bakal pasangan calon berupa bukti kelulusan, seperti

fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Adapun Pasal 18 ayat (3) mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Selain itu, Pasal 19 mengatur kewajiban bakal calon presiden dan wakil presiden untuk menyerahkan bukti kelulusan pendidikan tinggi apabila mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam daftar riwayat hidup.

Hasyim mengatakan, perumusan norma tersebut dilakukan dalam rangkaian proses penyusunan PKPU, termasuk uji publik, konsultasi dengan kementerian dan lembaga, serta harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum.

Dia juga menjelaskan kronologi penetapan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden.

"Perbandingan 2 ketentuan tersebut, PKPU 19/2023 ditetapkan 9 Oktober 2023 (diundangkan 13 Oktober 2023). Putusan MK No. 90/2023 dibacakan 16 Oktober 2023," tutur Hasyim.

"Jadi pasal tentang dokumen syarat pendidikan dalam PKPU 19/2023 Pasal 18 ayat (1) huruf m dan ayat (3) dirumuskan lebih awal daripada pembacaan putusan MK, dan rumusan norma pasal tersebut hasil masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, dalam forum uji publik dan RDP, dan sudah hasil harmonisasi dan sinkronisasi oleh ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Sentil Doli Kurnia soal Pasal Ijazah Gibran: Lupa Boleh, Munafik Jangan

Oleh Redaksi · 12 Okt, 17.55 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Capres dan Cawapres tak pernah dibahas dalam rapat di DPR. Hal itu disampaikan merespons anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang menyebut pasal itu tak pernah dibahas.

"Pernyataan tersebut perlu dibantah dan diklarifikasi dengan tujuan agar kita sama-sama mengetahui situasi yang terjadi dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) pada waktu itu," kata Hasyim dalam keterangannya, dikutip Senin (12/10/2026).

Hasyim membeberkan sejumlah data, dokumen, serta fakta otentik yang menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) saat itu. Dari dokumen-dokumen itu, Hasyim menegaskan rumusan pasal yang dipersoalkan (Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023) sebelumnya berada dalam Pasal 19 ayat (2) dalam draf yang dibahas bersama.

RDP tersebut, kata dia, juga dihadiri langsung Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II saat itu, serta Arsul Sani yang ketika itu menjabat anggota Komisi II DPR dan kini telah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Materi dalam draf PKPU tersebut telah disetujui bersama sebagai kesimpulan RDP dalam bentuk tanda tangan pimpinan lembaga yang terlibat," ujarnya.

"Pasal tersebut diketahui banyak pihak, sudah dibahas bersama dan

disetujui semua pihak. Tidak benar tuduhan 'penyelundupan pasal' dan 'manipulasi pasal' tersebut," lanjutnya.

Hasyim menambahkan, tidak ada catatan keberatan terhadap pasal tersebut dari seluruh peserta RDP. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta DPR dan pemerintah disebut hadir dan terlibat aktif.

Sebagai pengingat moral bagi semua pihak, Hasyim kemudian mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:

"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanat dia berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim).

"Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, 'Lupa Boleh, Munafik Jangan'," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku tak pernah membahas revisi Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bukti kelulusan tingkat sekolah menengah bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR.

"Setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat (3) itu nggak ada, gitu lho, ya," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

DKPP Terima 2 Aduan soal Polemik Ijazah Wapres Gibran, Pimpinan KPU dan Bawaslu Diadukan

Oleh Redaksi · 12 Okt, 09.18 WIB



BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Aduan tersebut ditujukan kepada sejumlah pimpinan lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi, mengatakan kedua aduan itu diterima pada waktu berbeda. Yakni Kamis (8/10) dan Jumat (9/10). Saat ini, DKPP akan memeriksa kelengkapan administrasi masing-masing aduan sebelum menentukan tahapan penanganan selanjutnya.

"Aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhammad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026 yang kami berikan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026. Pihak

yang diadukan dalam aduan ini adalah Ketua dan lima Anggota KPU RI," kata pria yang karib disapa Raka Sandi kepada wartawan pada Minggu (11/10).

Sementara itu, aduan kedua diajukan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan. Aduan tersebut tercatat dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.

Kedua pengadu memberikan kuasa hukum kepada sejumlah advokat untuk mengadukan 11 penyelenggara pemilu, yang terdiri atas enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Bawaslu RI.

Raka Sandi menegaskan DKPP menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Setiap aduan yang diterima akan ditangani sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dua aduan tersebut akan segera diproses dalam verifikasi administrasi. Jika hasilnya memenuhi syarat, akan kami lanjutkan ke

tahap verifikasi materiel," ucapnya.

Verifikasi administrasi merupakan tahap pemeriksaan formal untuk memastikan kelengkapan persyaratan pengaduan atau laporan yang masuk ke DKPP. Adapun verifikasi materiel dilakukan dengan memeriksa alat bukti serta relevansinya terhadap substansi aduan, terutama untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang memenuhi syarat untuk disidangkan.

Apabila hasil verifikasi administrasi menyatakan aduan memenuhi syarat (MS), DKPP akan memberikan nomor registrasi aduan dan melanjutkan penanganannya ke tahap verifikasi materiel. Sebaliknya, jika aduan dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS), pemberitahuan tertulis akan disampaikan kepada pengadu paling lambat lima hari kerja setelah proses verifikasi.

Mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

"Khusus aduan yang berstatus BMS, DKPP akan memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh Pengadu. Jika tidak dilengkapi, aduan dinyatakan gugur," ujar Raka Sandi.

Tahapan serupa juga berlaku dalam verifikasi materiel. Jika aduan dinyatakan memenuhi syarat pada tahap ini, penanganannya akan ditingkatkan menjadi perkara, diberikan nomor registrasi perkara, dan selanjutnya dijadwalkan untuk menjalani sidang pemeriksaan.

Raka Sandi menyadari tingginya perhatian masyarakat terhadap dua aduan yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Guru Besar UGM: Wapres Mengundurkan Diri itu Bukan Hoax!

Oleh Redaksi · 12 Okt, 23.35 WIB



BANDA ACEH - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim menegaskan bahwa fenomena pengunduran diri seorang Wakil Presiden Republik Indonesia bukanlah berita bohong atau hoaks.

Peristiwa tersebut pernah benar-benar terjadi dan tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

"Wapres RI mengundurkan diri, itu bukan hoax. Namanya Muhammad Hatta. Dia orang pintar, berpendidikan tinggi, seorang bibliophile," kata Abdul Gaffar merujuk pada Bapak Proklamator yang menjabat sebagai Wakil Presiden pertama RI sejak 1945 hingga 1956.

Pengunduran diri Mohammad Hatta yang resmi dilakukan pada 1 Desember 1956 tersebut menandai berakhirnya era Dwitunggal secara formal.

Keputusan bersejarah ini dipicu oleh perbedaan pandangan mendasar antara Hatta dan Presiden Sukarno terkait implementasi sistem pemerintahan.

Hatta, yang merupakan pendukung teguh demokrasi parlementer, menyuarakan kekhawatiran

nya atas sentralisasi kekuasaan di tangan presiden.

Lebih dari sekadar perbedaan prinsip, Hatta juga memegang teguh komitmen politiknya. Ia memang berniat meletakkan jabatan setelah lembaga perwakilan rakyat (DPR dan Konstituante) hasil Pemilu 1955 terbentuk.

Ia merasa perannya sebagai wakil presiden tidak lagi fungsional dalam struktur pemerintahan yang baru saat itu.

Niat pengunduran diri tersebut sebenarnya sudah mulai diajukan Hatta sejak tahun 1955 seiring terakumulasinya ketegangan Politik.

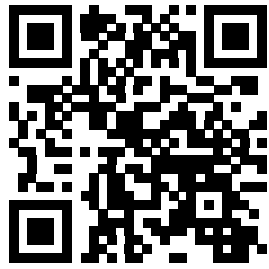
Sehari sebelum resmi mundur, tepatnya pada 30 November 1956, Hatta bahkan mengadakan pertemuan dengan delegasi DPR, termasuk Wakil Ketua II DPR Arudji Kartawinata, untuk membahas pelepasan jabatannya.

Pelepasan jabatan ini pada akhirnya secara struktural mengakhiri keseimbangan kepemimpinan yang sebelumnya terbangun, sekaligus membuka jalan bagi Presiden Sukarno untuk menerapkan konsep politik sentralisasinya yang kemudian dikenal sebagai era Demokrasi Terpimpin.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

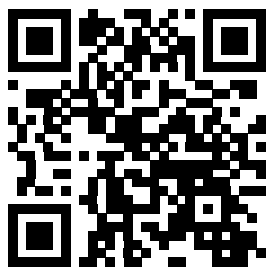
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mantan Ketua KPU Bantah Pasal Gibran Diselundupkan, Singgung Kehadiran Ahmad Doli dan Arsul Sani

Oleh Redaksi · 12 Okt, 09.13 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah tuduhan bahwa Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diselundupkan tanpa melalui pembahasan bersama DPR. Ia menegaskan, ketentuan tersebut telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan disetujui para pihak yang hadir.

Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang mengaku tidak pernah membahas pasal tersebut bersama KPU. Mengingat, saat pembahasan berlangsung, Doli menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024.

"Dalam sejumlah pemberitaan media muncul pernyataan Ahmad Doli Kurnia bahwa mengaku tidak pernah membahas revisi Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 tentang Pencalonan Capres dan Cawapres

dalam RDP DPR bersama Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP. Pernyataan tersebut perlu dibantah dan diklarifikasi," kata Hasyim kepada wartawan pada Senin (12/10).

Ia menjelaskan KPU telah mengirimkan surat kepada DPR pada 19 September 2023 untuk mengajukan konsultasi terhadap empat rancangan PKPU. Surat tersebut disertai draf peraturan yang akan dibahas, termasuk rancangan PKPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sehari kemudian, tepatnya 20 September 2023, RDP digelar dengan agenda konsultasi rancangan PKPU. Menurut Hasyim, Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi bagian dari materi pembahasan dalam rapat tersebut. Sebelumnya, ketentuan yang dipersoalkan itu tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) pada draf yang dibahas.

Hasyim menyebut sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga menghadiri rapat tersebut. Di

antaranya Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang saat itu memimpin Komisi II DPR serta Arsul Sani, yang kini menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Perwakilan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri juga terlibat dalam pembahasan.

Ia menegaskan, hasil pembahasan draf PKPU telah dituangkan dalam kesimpulan RDP yang disetujui melalui tanda tangan para pimpinan lembaga terkait. Hasyim menyebut dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pembahasan telah berlangsung dan disepakati bersama.

"Dokumen tanda tangan persetujuan kesimpulan RDP pembahasan Draft PKPU 19/2023 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota Bawaslu (Plh. Ketua Bawaslu) Herwyn Jeffer Hielsa Malonda, Ketua DKPP

Heddy Lugito, dan Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar," ujarnya.

Berdasarkan informasi, data, dan dokumen yang dimilikinya, Hasyim menyimpulkan bahwa pasal tersebut diketahui oleh para peserta rapat, telah dibahas, dan memperoleh persetujuan. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa ketentuan tersebut dimasukkan secara diam-diam atau melalui manipulasi. "Tidak benar tuduhan penyelundupan pasal dan manipulasi pasal tersebut," tegasnya.

Hasyim turut menyatakan bahwa tidak terdapat catatan keberatan dari peserta RDP terhadap pasal yang kini menjadi polemik. Ia juga menyoroti keterlibatan KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam pembahasan rancangan peraturan tersebut. Bahkan, menurut dia, perwakilan Bawaslu dan DKPP ikut menandatangani persetujuan kesimpulan rapat.

» **Selengkapnya di www.harianaceh.co.id**

NASIONAL

Disindir Munafik, Ahmad Doli Kurnia Sentil Balik Hasyim Asy'ari: Dia Lupa 2 Kali Dipecat dari Ketua KPU

Oleh Redaksi · 12 Okt, 20.22 WIB



Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung merespons keras pernyataan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yang menyindirnya soal sikap munafik terkait polemik aturan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Doli menilai, pernyataan Hasyim yang mengingatkannya bahwa 'lupa boleh, munafik jangan' justru mencerminkan diri Hasyim sendiri.

Dia turut menyinggung pemberhentian Hasyim dari jabatan Ketua KPU serta posisinya saat ini sebagai komisaris di salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

"Jadi, Saudara Hasyim itu sebenarnya sedang membicarakan atau menjelaskan tentang dirinya sendiri, ya. Dia menggunakan kata lupa dan munafik, ya," ucap Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Dia lupa, dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai Ketua KPU karena kemunafikannya, gitu ya, dan dia menikmati kemunafikan itu. Sekarang sedang menikmati kemunafikan itu," tuturnya.

Tak hanya membalas sindiran tersebut, politisi Partai Golkar itu juga mempertanyakan penunjukan Hasyim sebagai komisaris BUMN di sektor perkebunan.

Doli meminta Hasyim menjelaskan proses di balik pengangkatan

tersebut, termasuk pertimbangan yang membuatnya mendapat jabatan itu.

"Coba tanya sama dia, itu dia tuh dapat dari mana komisaris itu? Hadiah dari siapa? Gitu kan, dapat komisaris itu? Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya yang berkaitan dengan soal perkebunan. Gitu loh. Ya dia harus jelaskan itu. Kok bisa dia dapat posisi jadi komisaris itu, ya kan? Nah, ini yang harus dicari menurut saya," kata dia.

Doli mengaku sebelumnya memilih tidak memperkeruh polemik dan hanya menyimpan sejumlah data tanpa berniat mengungkapkannya ke publik. Namun, setelah namanya disebut secara pribadi oleh Hasyim, dia merasa perlu memberikan penjelasan.

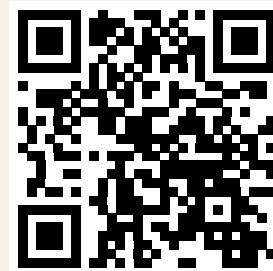
"Cuman karena ini sudah nyebut nama saya pribadi, ya saya harus jelaskan. Kalau memang mau dibuka, ya kita buka. Gitu, ya," tuturnya.

Polemik ini berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang sebelumnya dipersoalkan karena dinilai membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Dalam polemik tersebut, aturan itu disebut sebagai pasal selundupan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Relawan Rampai Nusantara Sentil Elite Koalisi: Kalian Jadi Menteri karena Gibran!

Oleh Redaksi · 12 Okt, 09.09 WIB



BANDA ACEH - Mardiansyah Semar menyentil elite partai koalisi yang dinilai diam saat Gibran disorot. Dia menegaskan, jabatan menteri tak lepas dari peran Gibran.

Ketua Umum Relawan Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, melontarkan kritik tajam terhadap elite partai Politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia menyoroti sikap para ketua umum partai koalisi yang dinilai kurang menunjukkan pembelaan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika menghadapi berbagai polemik politik.

Tak tanggung-tanggung, Semar mengaitkan posisi para elite partai yang kini menjabat menteri dengan peran Gibran dalam dinamika politik nasional.

Pernyataannya tersebut menjadi sorotan karena secara langsung menyentil para pemimpin partai yang berada dalam lingkaran pemerintahan.

"Ini gue kasih tahu aja, kalian para ketua umum partai dalam partai koalisi itu, kalian semua bisa duduk menjadi menteri itu

karena Mas Gibran," tegas Semar, dikutip Minggu (11/10/2026).

Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan Semar terhadap sikap elite koalisi yang menurutnya belum memberikan dukungan memadai kepada Gibran.

Dia menilai, para pemimpin partai seharusnya mempertimbangkan kembali dinamika politik yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

Semar juga menyoroti tekanan politik yang belakangan diarahkan kepada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Dia menduga polemik yang berkembang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melemahkan posisi Gibran menjelang Pemilu 2029.

"Sehingga orang kayak beramai-ramai melakukan upaya mengampulasi terhadap Mas Gibran," ujar Semar.

Meski demikian, dugaan mengenai adanya upaya sistematis untuk melemahkan Gibran tersebut merupakan pandangan Semar.

Pernyataannya tidak serta-merta membuktikan bahwa kritik terha-

dap Wakil Presiden merupakan bagian dari manuver politik terorganisasi

Kritik Semar tidak hanya menyasar sikap politik para ketua umum partai, tetapi juga menyinggung hubungan antara dukungan dalam kontestasi pemilihan presiden dan pembagian posisi di pemerintahan.

Menurut pandangannya, elite partai koalisi semestinya tidak mengabaikan kontribusi Gibran dalam dinamika politik yang membentuk pemerintahan saat ini.

Namun, klaim bahwa para ketua umum partai memperoleh jabatan menteri karena Gibran belum dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti pendukung.

Semar sendiri dikenal sebagai tokoh relawan yang dekat dengan Jokowi.

Kedekatan itu menjadi konteks dalam memahami kritiknya terhadap perkembangan politik yang melibatkan Gibran.

Pernyataan Semar muncul di tengah kembali mencuatnya polemik dokumen pendidikan Gibran.

Perhatian publik meningkat setelah Mahkamah Konstitusi

(MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Majelis hakim juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan dalam persidangan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Putusan tersebut tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Pernyataan permohonan tidak dapat diterima juga berbeda dari putusan yang mengabulkan permintaan pemberhentian atau disqualifikasi pejabat.

Perdebatan mengenai posisi Gibran kemudian berkembang menjadi beragam pandangan politik, termasuk wacana pemakzulan.

NASIONAL

Usai Riyadh Dibombardir Houthi, Menlu Iran Kontak Menlu Arab Saudi

Oleh Redaksi · 12 Okt, 17.37 WIB



BANDA ACEH - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi dan Iran membahas eskalasi kawasan terbaru serta upaya untuk mengatasinya melalui saluran telepon pada Ahad(11/10/2026) waktu setempat.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui media sosial X, Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dan Menlu Iran Abbas Araghchi berbicara melalui saluran telepon yang diinisiasi oleh Araghchi.

Kemlu Saudi mengatakan para menlu membahas "eskalasi terkini di kawasan beserta upaya yang ditempuh untuk mengatasinya". Tidak ada informasi lain yang diberikan terkait interaksi antara kedua menlu.

Panggilan telepon tersebut berlangsung di tengah eskalasi militer kawasan, termasuk berlanjutnya serangan ke bandara-bandara di Arab Saudi dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz.

Serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada Sabtu, mengakibatkan 13 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.

Pada Ahad, koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional menuding kelompok Syiah Yaman Houthi sebagai pihak yang melakukan serangan ke bandara tersebut.

Koalisi tersebut bersumpah akan membalas serangan dengan tegas. Sementara itu, pelayaran melalui Selat Hormuz masih terganggu

menyusul pembatasan pelayaran kapal oleh pihak Iran pada April 2026 setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan ke Iran pada Februari 2026.

Cegat rudal

Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah mencegah dan menghancurkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan kelompok Houthi ke arah Khamis Mushait, wilayah barat daya Arab Saudi.

Juru bicara koalisi, Turki al-Maliki, mengumumkan pencegahan rudal tersebut melalui platform X pada Senin. Sebelumnya, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan di Abha, sebuah kota dekat lokasi sasaran. Mereka kemudian mengumumkan bahwa ancaman tersebut telah berlalu.

Aksi pencegahan tersebut terjadi di tengah meningkatnya serangan baru oleh kelompok Houthi ke Arab Saudi, termasuk serangan ke bandara.

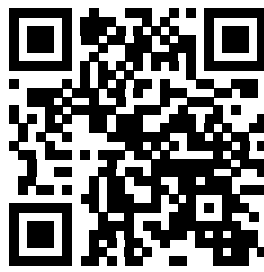
Pada Ahad(11/10), serangan ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menyebabkan seorang warga Pakistan tewas dan 11 orang lainnya terluka, menurut Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi.

Para pelayat mengusung peti jenazah seorang pejuang Houthi yang tewas dalam pertempuran baru-baru ini saat prosesi pemakaman di Sanaa, Yaman, 15 September 2026.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

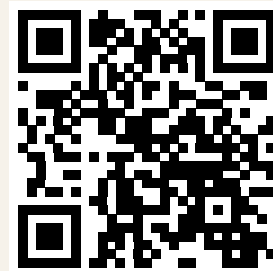
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Muncul Gerakan Turunkan Foto Wapres Gibran di Semua Instansi

Oleh Redaksi · 12 Okt, 16.10 WIB



BANDA ACEH - Gerakan bertajuk “Turunkan Foto Wapres Gibran di Semua Instansi” mulai disuarakan melalui media sosial setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu unggahan yang menyerukan gerakan tersebut berasal dari pemilik akun X, Abi Jamaluddin dengan nama akun @PutraMataSatu. Ia menuliskan ajakan yang mengarah pada gerakan nasional untuk menurunkan foto Gibran di berbagai instansi.

Seruan tersebut muncul di tengah perbincangan publik mengenai putusan MK pada Selasa, 6 Oktober 2026, yang menyatakan tidak menemukan

bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Dalam keterangan resminya, MK menjelaskan bahwa dokumen yang terungkap dalam persidangan tidak menunjukkan bukti kelulusan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Permohonan yang diajukan sejumlah pihak itu akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan perkara tersebut. MK juga menyebut persoalan pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden secara substantif menjadi ranah lembaga yang berwenang.

Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak mempermasalahkan temuan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran, sementara persoalan kedudukan hukumnya sebagai wakil presiden tidak berubah akibat putusan tersebut.

Seruan menurunkan foto Gibran di semua instansi mencerminkan adanya ekspresi ketidakpuasan yang disampaikan melalui media sosial. Meski demikian, sejauh informasi yang tersedia, belum ada data terverifikasi yang menun-

jukkan seberapa luas gerakan tersebut menyebar atau berapa banyak instansi yang menindaklanjutinya.

Belum dapat dipastikan pula apakah ajakan yang disampaikan Abi Jamaluddin akan berkembang menjadi gerakan terorganisasi secara nasional atau tetap menjadi seruan di media sosial.

Polemik ini memperlihatkan bahwa putusan pengadilan dapat memunculkan perdebatan lanjutan di tengah masyarakat. Perkembangan gerakan tersebut masih perlu dipantau, termasuk respons masyarakat, sikap instansi pemerintah, serta penjelasan dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan terkait persyaratan pendidikan pejabat negara.

NASIONAL

Gibran Bisa Seret Banyak Pejabat, Mahfud MD Cerita Ada Arahan Tiga Menteri Saat Pencalonan

Oleh Redaksi · 12 Okt, 17.50 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap informasi mengenai dugaan keterlibatan tiga menteri dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan arahan untuk mengondisikan aturan pemilu agar persoalan persyaratan ijazah tidak menghambat pencalonan Gibran.

Mahfud menyampaikan hal itu dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary. Ia mengutip informasi dari podcast yang dipandu mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.

Menurut Mahfud, Bambang menghadirkan seorang tamu misterius (mystery guest) yang disebut sebagai mantan pejabat tinggi. Sosok tersebut diklaim mengetahui dan menyaksikan adanya arahan dari tiga menteri terkait proses pencalonan Gibran.

"Ada sebuah podcast menarik dari Bambang Widjojanto yang mengundang mystery guest, mantan pejabat tinggi yang tahu dan menyaksikan bahwa ada tiga menteri yang memerintahkan kondisikan kemenangan Gibran," ungkap Mahfud.

Mahfud mengatakan, arahan tersebut diduga berkaitan dengan penyusunan aturan yang mengatur

persyaratan pencalonan. Ia menyoroti Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menjadi bagian dari polemik persyaratan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri.

"Jangan terhalang karena ijazah, maka dibuat pasal itu," ujar Mahfud menirukan substansi perintah yang dimaksud.

Ia menilai dugaan intervensi tersebut perlu ditelusuri karena berkaitan dengan proses penyusunan regulasi dan penerapan persyaratan administrasi pencalonan. Mahfud juga menyoroti proses yang dinilai berpotensi mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengecam praktik manipulasi aturan apabila dugaan tersebut terbukti. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi pemilu, tetapi juga integritas penyelenggaraan negara.

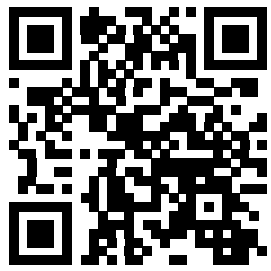
"Ini sebenarnya kejahatan moral yang luar biasa dan merusak peradaban. Kita bernegara, negara hukum, negara demokrasi yang sudah kita bangun 80 tahun lebih dirusak hanya karena menggibran-kan aturan," tegas Mahfud.

Ia mendesak agar dugaan manipulasi dalam penerbitan aturan KPU tersebut diusut, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran pidana oleh pihak-pihak yang terlibat.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

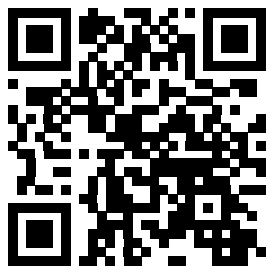
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KIPP-AKSI Desak Fraksi Golkar Bentuk Hak Angket Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 12 Okt, 17.47 WIB



BANDA ACEH -Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) untuk Angket Gibran mendesak Fraksi Partai Golkar DPR untuk menggunakan Hak Angket mengusut polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Perwakilan KIPP Indonesia, Ray Ranguti, bersama perwakilan AKSI, Ubedilah Badrun, mahasiswa, dan yang lainnya menyampaikan desakan tersebut saat menyerahkan aspirasi kepada DPR, di Ruang Badan Legislasi (Baleg), Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Mereka meminta Fraksi Golkar di DPR menggunakan kewen-

angan konstitusional untuk menguji persoalan yang dinilai belum memberikan kepastian kepada publik.

Ubedilah mengatakan, DPR dapat memanggil pihak-pihak terkait melalui hak angket untuk menguji persoalan tersebut.

"Yang jelas kami, masyarakat sipil, ingin bahwa konstitusi kita tegak, demokrasi kita dijalankan dengan baik, dan kita punya standar etik tertinggi dalam menjelaskan atau memposisikan seorang pemimpin itu," kata Ubedilah.

Atas dasar itu, Ubedilah menyebutkan bahwa jika ditemukan pelanggaran, prosesnya dapat dilanjutkan melalui hak menyatakan pendapat yang berpotensi berujung pada pemakzulan.

"Jadi kalau ditemukan pelanggaran etik berat dari seorang wakil presiden, maka saya kira konsekuensinya hak konstitusional parlemen, DPR sampai ke MPR wajib dijalankan demi kepentingan bangsa dan negaranya," kata Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Menanggapi desakan itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa bahwa pihaknya menerima aspirasi masyarakat sipil dan akan meneruskannya kepada pimpinan fraksi maupun partai.

"Akan kemudian kami tidak lanjut, saya akan sampaikan kepada pimpinan kami di fraksi maupun di partai," kata Doli.

Doli menambahkan, DPR memiliki sejumlah mekanisme untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada penyelenggara pemilu. Namun, ia mengingatkan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, Doli menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan pembentukan hak angket.

"Kami akan pertimbangkan dan menindaklanjuti usulan dari kawan-kawan untuk membentuk angket dalam rangka untuk pengujian kembali soal apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi," pungkas Doli.

NASIONAL

Mercy Sihombing Sebut Gibran Tak Layak Jadi Wapres: Kalau Punya Nurani, Anda Mundur

Oleh Redaksi · 12 Okt, 17.59 WIB



BANDA ACEH - Pegiat pendidikan sekaligus praktisi hukum, Mercy Sihombing mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres). Hal itu menyusul ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Gibran tidak memiliki bukti ijazah SMA sederajat.

"Gibran dari awal tidak layak menjadi calon Wapres karena dia tidak pernah memiliki (memenuhi) persyaratan. Sekarang dia sudah dua tahun menjadi Wapres, masa kita membiarkan dia menjabat lagi untuk terus-terusan, sudah cukup ya Mas Gibran, kalau Anda punya nurani, Anda mundur," ujarnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (11/10/2026).

Dia turut mendatangi DPR untuk menyampaikan aduan bersama Aliansi Rakyat Menggugat dan ormas Pejabat (Pengacara Jawara Bela Umat). DPR diminta menggunakan haknya mengajukan pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran.

Mercy diketahui merupakan salah satu pemohon bersama Denny Indrayana cs yang menggugat syarat pendidikan Gibran ke MK.

"Saya Mercy Sihombing, pengacara dan juga pendidik selama 16

tahun berjibaku, saya mengajar semua siswa saya yang memang semuanya anak-anak cerdas dan mandiri untuk memperjuangkan satu hal, ijazah harus jujur. Tanggal 6 Oktober, saya sebagai salah satu pemohon di MK, menjadi saksi Mahkamah Konstitusi sudah berbicara, mereka tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah setara SMK," katanya.

"Kita juga sama-sama menyaksikan permainan di Kemendikbud yang menerbitkan suket itu sudah ditelanjangi. Artinya, Gibran memang dari awal tidak layak menjadi calon wakil presiden karena dia memang tidak pernah memiliki persyaratan," ujar Mercy lagi.

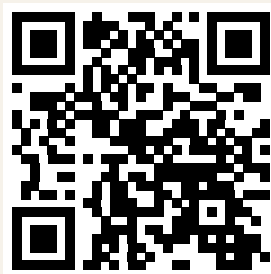
Sebelumnya, dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyeteraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tenggat waktu yang kedaluwarsa.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Wacana Pansus Ijazah Gibran, Anggota DPR Kutip Lagu: Jika Tidak Hari Ini Mungkin Minggu Depan

Oleh Redaksi · 12 Okt, 10.34 WIB



BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR Abdullah, menanggapi santai dan berseloroh terkait kans DPR membentuk panitia angket atau panitia khusus (pansus) untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dia pun menyinggung lirik lagu berjudul Kita Usahkan Lagi karya Batas Senja.

“Memang teman-teman sudah pegang nama dan tanda tangan anggota DPR yang mendorong hal tersebut? Kalau ditanya kapan DPR akan menyikapi putusan ini, jawabannya seperti lirik lagu, ‘jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan,’ ujar Abdullah dalam keterangannya, dikutip Senin (12/10/2026).

Abduh, sapaan akrabnya, mengaku menerima banyak desakan dari berbagai lapisan masyarakat agar DPR menyikapi putusan MK tersebut. Dia menjelaskan dirinya bersama anggota DPR lainnya masih mempelajari putusan tersebut secara lengkap dan utuh sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

“Saya mau menyerap aspirasi masyarakat dahulu terkait ijazah Gibran ini. Dari hasil menyerap aspirasi tersebut, nanti saya bawa ke partai dan akan saya teruskan kepada para pimpinan di DPR,” ujar Abduh.

Di media sosial, dia mengaku melihat banyak masyarakat dari berbagai lapisan meluapkan kekecewaannya setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait dokumen kelulusan

Gibran yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Namun, menurutnya, ada pula pihak yang berusaha memelintir putusan MK dan konteks persyaratan pencalonan wakil presiden dengan menganggap bahwa riwayat pendidikan diploma dan sarjana Gibran otomatis menjawab persoalan tersebut.

“Saya meminta jangan spin putusan MK dan konteks syarat cawapres itu, karena ini akan membuat masyarakat bingung dan kecewa lagi nanti,” tegas Abduh.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menegaskan bahwa dirinya akan menyikapi putusan MK terkait ijazah Gibran dengan berpegang teguh pada konstitusi. Menurutnya, prinsip utama dalam negara demokrasi adalah menjunjung tinggi konstitusi beserta peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan negara.

“Jadi, kita ikuti prosesnya sesuai konstitusi. Banyak pihak yang mengaitkan kasus ini dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Itu akan saya pelajari dahulu secara menyeluruh,” pungkas Abduh.

Sekedar informasi, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu. Hal ini tertuang dalam putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

NASIONAL

Ahmad Khozinudin Ngamuk di DPR saat Sampaikan Desakan Pemakzulan Gibran: Rakyat Mau Masuk

Oleh Redaksi · 12 Okt, 13.19 WIB



BANDA ACEH - Ahmad Khozinudin dan rombongannya sempat tertahan di pintu masuk Gedung DPR saat hendak menyampaikan desakan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Senin (12/10/2026). Khozinudin bahkan sempat mengamuk karena merasa dipersulit petugas keamanan.

Desakan itu disampaikan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu. Hal ini tertuang dalam putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

“Protokol macam apa ini? Rakyat mau masuk, mengirim surat, mau bertemu dengan wakilnya enggak diperkenankan, hanya batasan dua. Ini berapa triliun gedung ini dibangun dari rakyat? Karyawan semuanya dibayar oleh rakyat,” ujar Khozinudin di pintu masuk DPR, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dia memprotes petugas pengamanan dalam yang mempertanyakan izin kunjungan rombongan-nya. Petugas disebut meminta izin tersebut dikirimkan terlebih

dahulu sebelum mereka memasuki gedung.

Setelah berdebat dengan petugas, rombongan Khozinudin akhirnya diperbolehkan masuk ke gedung parlemen.

Tak lama kemudian, rombongan Mercy Sihombing juga tertahan di Gerbang Pancasila Gedung DPR. Petugas keamanan mengarahkan rombongan tersebut untuk masuk melalui pintu pejalan kaki.

Namun, mereka mengaku sebelumnya justru diarahkan masuk melalui Gerbang Pancasila.

Situasi sempat memanas hingga petugas kepolisian membuat blokade di depan rombongan tersebut. Khozinuddin kemudian mendatangi rombongan Mercy dan berkomunikasi dengan petugas pengamanan.

Setelah itu, rombongan Mercy akhirnya dapat masuk ke dalam gedung.

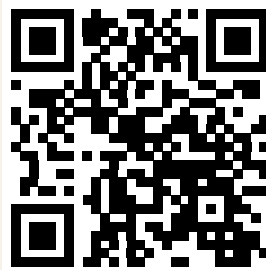
Mercy turut memprotes prosedur pengamanan yang dinilai menyulitkan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

“Saya mohon pada Pimpinan DPR, tolonglah, latih pamdal, security untuk menghormati tamu, kami ke sini ke rumah kami, ke rumah rakyat. Saya marah, saya disuruh muter dan parkir di GBK untuk masuk ke sini, urusan sepele ini jadi panjang karena kita sebagai rakyat justru dihalang-halangi masuk rumah rakyat,” kata Mercy

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

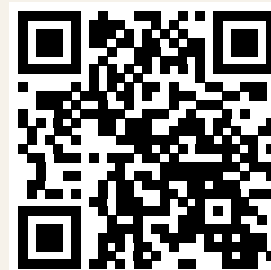
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jerry Massie Kritik Keras Luhut soal Ijazah: Jangan Sampai Pendidikan Dianggap Tak Penting

Oleh Redaksi · 12 Okt, 10.44 WIB



BANDA ACEH - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie melontarkan kritik keras terhadap Luhut Binsar Pandjaitan setelah pejabat tersebut menyebut polemik ijazah tidak relevan untuk dibicarakan oleh kalangan intelektual.

Jerry menilai pernyataan Luhut berpotensi melukai kalangan akademisi dan menimbulkan persepsi keliru mengenai pentingnya pendidikan formal. Ia bahkan meminta agar sekolah yang didirikan Luhut di Sumatera Utara turut menjadi bahan pembicaraan apabila ijazah dianggap tidak penting.

"Bubarkan aja kampus-kampus di Indonesia kalau ijazah sudah tak penting," tulis Jerry dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Minggu (11/10/2026).

Ia juga menyampaikan kritik serupa terhadap lembaga pendidikan yang dikaitkan dengan Luhut. Menurut Jerry, pernyataan mengenai ijazah seharusnya disampaikan secara hati-hati karena pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Jerry menilai pandangan Luhut tersebut tidak tepat, terlebih karena pernyataan itu muncul di tengah polemik mengenai riwayat pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Pernyataan Luhut bagaikan dia tak sekolah dan tak punya ijazah SMA. Bagi saya Luhut ini bapak perusak pendidikan Indonesia," tulis Jerry.

Ia berpendapat, jika ijazah dianggap tidak penting secara

mutlak, masyarakat bisa mempertanyakan kembali arti pendidikan formal dan upaya negara membangun sekolah serta perguruan tinggi.

"Masakan ijazah tak penting berarti secara filosofis tak perlu sekolah biar kita bodoh dan buta huruf," lanjutnya.

Jerry juga mengkritik sikap Luhut yang dinilainya terlalu membela Jokowi. Ia mempertanyakan kontribusi sejumlah tokoh pemerintahan terhadap negara dan melontarkan berbagai kritik atas kebijakan pada era pemerintahan sebelumnya.

Dalam pernyataannya, Jerry menyinggung pengelolaan sumber daya alam, utang negara, serta dugaan kerugian akibat korupsi. Namun, angka dan tuduhan yang

disampaikannya tersebut merupakan klaim Jerry dan memerlukan verifikasi tersendiri.

Ia turut mempertanyakan kontribusi Luhut dalam mendorong investasi dan menyinggung kunjungan ke Amerika Serikat yang menurutnya tidak menghasilkan hasil sebagaimana diharapkan.

Menurut Jerry, pejabat publik semestinya mendorong generasi muda untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin demi mengembangkan kemampuan dan mencapai cita-cita.

"Saya pikir sudah tua sudah bertobat ternyata belum," tulisnya dalam kritik yang ditujukan kepada Luhut

NASIONAL

Aji Cahyono yang Bawa Golok saat Bubarkan Ibadah Gereja GKPI di Tangerang Jadi Tersangka

Oleh Redaksi · 12 Okt, 18.03 WIB



BANDA ACEH - Polresta Tangerang menetapkan Aji Cahyono Putra sebagai tersangka kasus viral pembubaran ibadah Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Rajeg, Kabupaten Tangerang. Aji merupakan sosok yang membawa golok pada saat itu.

"Benar, terhadap saudara AC telah dilakukan penetapan tersangka pada 9 Oktober 2026," kata Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Senin (12/10/2026).

Indra tak memerinci apakah polisi telah menahan Aji. Menurut dia, penahanan tersebut merupakan kewenangan penyidik.

"Adapun terkait penahanan, hal tersebut merupakan kewenangan penyidik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku," lanjut Indra.

Indra menyebut, penetapan tersangka Aji dilakukan atas tiga laporan kepolisian. Dia menegaskan, polisi akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Terkait tiga laporan yang diterima, terlapor dalam perkara tersebut adalah saudara AC. Kami

mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan," katanya.

Sebelumnya, aksi pembubaran ibadah Jemaat GKPI di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kabupaten Tangerang pada Minggu (20/9/2026) lalu viral di media sosial. Kejadian bermula saat sejumlah pemuda mendatangi lokasi kegiatan ibadah. Dalam video yang beredar, mereka terlihat meminta kegiatan tersebut dihentikan. Salah seorang pemuda juga tampak membawa senjata tajam.

Pada malam harinya, salah satu pelaku pembubaran meminta maaf. Pria yang diketahui membawa senjata tajam saat pembubaran itu mengaku menyesal.

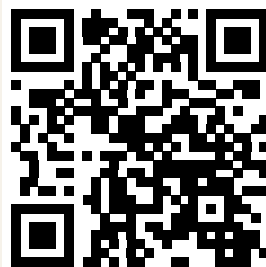
"Dengan kekhilafan saya pribadi dengan kejadian tadi siang, saya menyesalinya dengan sebenarnya," katanya saat mediasi.

"Jadi saya meminta maaf kepada pihak terkait jika apabila membuat resah atau membuat takut kepada saudara daripada tadi siang, kejadian tadi siang. Jadi mohon dimaafkan," tambahnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Politikus PKS: Daripada Sibuk Bahas Ijazah, Baguslah Seruput Kopi

Oleh Redaksi · 12 Okt, 15.26 WIB



BANDA ACEH - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menanggapi kabar beredarnya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR dengan sebuah pantun yang menyindir polemik ijazah.

“Daripada hujan baju pun basah Bagus dijemur di bawah kanopi Daripada sibuk bahas ijazah Baguslah seruput secangkir kopi.”, Ahad (11/10/2026).

Pantun tersebut disampaikan Tifatul untuk merespons pemberitaan CNN Indonesia berjudul “Beredar Surat Usul Pemakzulan Gibran di DPR, Istana Buka Suara” yang mengangkat isu usulan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

Melalui pantun itu, Tifatul mengajak publik melihat polemik yang tengah berkembang dengan

nada santai. Baris tentang kesibukan membahas ijazah menjadi bagian yang paling menonjol, disusul ajakan menikmati secangkir kopi.

Pernyataan tersebut muncul ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perbincangan Politik nasional setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024.

Sebelumnya, CNN Indonesia pada 8 Oktober 2026 memberitakan beredarnya surat usulan pemakzulan Gibran di DPR. Pemberitaan itu juga memuat tanggapan Istana mengenai persoalan tersebut.

Berdasarkan laporan sejumlah media, dokumen bertanggal 7 Oktober 2026 itu disebut diajukan oleh anggota DPR Fraksi

NasDem, Tonny Tesar, kepada pimpinan DPR RI.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan akan mengecek persoalan surat tersebut. Ia juga menyebut partainya masih mempelajari dan mengkaji putusan MK yang berkaitan dengan persoalan pendidikan Gibran.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan penanganan persoalan tersebut diserahkan kepada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Namun, munculnya surat usulan itu tidak berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan pemberhentian wakil presiden harus melalui tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

NASIONAL

Approval Rating Bakal Terdongkrak Jika Prabowo Tegas terhadap Kasus Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 12 Okt, 20.08 WIB



BANDA ACEH -Tingkat kepuasan kinerja atau approval rating dari Presiden Prabowo Subianto ikut tergerus tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyampaikan pandangan tersebut dalam podcast Terus Terang, yang tayang di kanal YouTube-nya.

Menurutnya, kegaduhan soal ijazah Gibran dapat membantu menaikkan approval rating Pra-

bowo kembali tinggi, jika diikuti ketegasan dalam hal penegakan dan keadilan hukum.

“Ini waktu yang tepat bagi Pak Prabowo. Karena 8 bulan lagi tahapan pemilu sudah akan dimulai. Dia mau calon lagi. Sudah akan dimulai tahapan awalnya itu,” kata Mahfud, dikutip Senin 12 Oktober 2026.

Mantan Ketua MK ini memandang, perbaikan approval rating petahana sangat dibutuhkan sedini mungkin.

“Approval rating Pak Prabowo

harus dinaikkan lagi oleh Pak Prabowo,” kata Mahfud.

Karena itu, Mahfud mendorong agar Prabowo bisa mengambil sikap bijak dalam merespons polemik ijazah Gibran. Karena terungkap di persidangan MK bahwa Gibran tidak ditemukan ijazahnya.

“Ini masalah peradaban, yang sudah kita bangun 80 tahun lebih. Peradaban jangan rusak karena ini. Ayo selesaikan secara politik. Bisa. Tapi kalau (kata) Pak Prabowo, nggak usah, ya nggak bakal jalan (penegakan hukumnya,” kata Mahfud.

NASIONAL

Syahganda Desak Anies Masuk Kabinet Prabowo: Jangan Malu-Malu...

Oleh Redaksi · 12 Okt, 10.40 WIB



BANDA ACEH – Syahganda blak-blakan dorong Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan di kabinet Prabowo.

Peluang kerja sama Politik antara Anies Baswedan dan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi pembicaraan.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI,

Syahganda Nainggolan, secara terbuka mengusulkan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bergabung dalam pemerintahan, bahkan menyebut jabatan Menteri Pendidikan sebagai posisi yang layak dipertimbangkan.

Usulan itu menarik perhatian lantaran Anies dan Prabowo sebelumnya berada di kubu berseberangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, bagi Syahganda, perbedaan pilihan politik tidak semesti-

nya menjadi penghalang apabila terdapat kesempatan untuk berkontribusi bagi negara.

Dalam tayangan kanal YouTube Total Politik yang disiarkan Minggu (11/10/2026), Syahganda menilai Anies memiliki kecocokan untuk mengemban tugas di bidang pendidikan.

“Saya mendorong dia (Anies) untuk jadi Menteri Pendidikan. Cocok, Anies cocok,” kata Syahganda.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal dukungan terbuka dari Syahganda terhadap kemungkinan Anies mengambil peran dalam pemerintahan Prabowo.

Meski demikian, usulan itu belum menunjukkan adanya keputusan resmi mengenai penempatan Anies dalam jajaran kabinet.

Syahganda menilai, pertimbangan untuk bergabung dalam

pemerintahan seharusnya tidak semata-mata ditentukan oleh pengalaman persaingan pada masa lalu.

Ia mengingatkan bahwa ego dan gengsi politik dapat menjadi penghalang ketika seseorang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam agenda pemerintahan.

Ia juga mengaitkan usulannya dengan perjalanan politik Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ketika Prabowo memberikan dukungan politik kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

“Tidak usah malu-malu. Pasti ada ego dan gengsi, tapi salah dong kalau gengsi. Bagaimanapun, yang membesarkan dia (Anies) kan Prabowo juga,” ujarnya

NASIONAL

Ahmad Khozinudin: Polisi Jangan jadi Pelayan Oligarki dalam Kasus Gibran

Oleh Redaksi · 12 Okt, 08.39 WIB



BANDA ACEH -Harapan baru terpancar dari Korps Bhayangkara di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menangani kasus dugaan pemalsuan surat keterangan (Suket) dalam proses pencalonan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada 2024.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin dalam podcast Madilog bersama Margi Syarif, dikutip pada kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin, 12 Oktober 2026.

“Yang jelas, Bareskrim sudah menerima dalam bentuk dumas dan mereka menjanjikan untuk

melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk ya tentu saja melakukan verifikasi dan memanggil para pihak. Kita tunggu. Dan kemarin kami sudah mendapat tanda terima dumasnya,” ucap Khozinudin.

Ia menegaskan bahwa laporan yang dibuat pada Rabu, 7 Oktober 2026 atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHP.PNS/XIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) itu juga untuk menguji komitmen Kapolri baru.

“Momentum ini kami ambil itu juga untuk menguji Kapolri yang baru. Jadi Pak Suyudi Ario Seto yang tagline-nya kan hari ini ‘Polisi Bersama Masyarakat’,

bukan presisi lagi kan begitu. Apakah benar polisi hari ini benar-benar bersama masyarakat atau ini kembali menjadi lip service?” tegasnya.

Ia pun berharap agar tagline tersebut tidak sekadar menjadi pencitraan tanpa makna, meskipun orang yang dilaporkan adalah RI 2.

“Ternyata polisi hanya bersama masyarakat pada saat polisi menginginkan citra itu ada pada masyarakat. Tapi ketika masyarakat betul-betul butuh kepolisian, polisi masih saja atau bisa saja menjadi pelayan oligarki atau pelayan kekuasaan,” pungkasnya.

NASIONAL

Bobby Nasution: Mas Gibran Setahu Saya Sarjana

Oleh Redaksi · 12 Okt, 08.34 WIB



BANDA ACEH -Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution turut berkomentar soal polemik ijazah kakak iparnya sekaligus Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

"Ya, Mas Gibran setahu saya sarjana ya," tegas Bobby dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Minggu, 11 Oktober 2026.

Bobby lantas menyentil narasi polemik ijazah yang kerap menyerang keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, tuduhan semacam itu seolah menjadi pola yang diulang kepada Gibran.

"Kalau Pak Jokowi kan dipermasalahkan sarjananya. Punya Mas Gibran dipermasalahkan SMA. Sekalian saja dipermasalahkan sarjananya (Gibran)," sindir

mantan Wali Kota Medan tersebut.

Kendati demikian, Bobby mengingatkan para elite Politik dan publik agar tidak terus-menerus terjebak dalam polemik yang tidak substansial. Menurutnya, fokus utama pemimpin saat ini adalah menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat bawah.

"Hari ini yang perlu kita pikirkan itu masyarakat. Masyarakat hari ini masih banyak yang kondisinya kesulitan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa ya harus diutamakan itu," tutur Bobby.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menyatakan tidak menerima gugatan ter-

kait syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka. MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut karena bukan merupakan peserta Pilpres 2024.

Meski gugatan tidak diterima, terdapat pertimbangan MK yang membuka tabir soal dokumen sah sebagai bukti kelulusan Gibran dari Sekolah Menengah Orchid Park.

Hal tersebut terungkap dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, di Ruang Sidang Utama Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat,

Jakarta Pusat, Selasa malam, 6 Oktober 2026.

"Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan, yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri," kata Hakim Konstitusi, Arsul Sani.

"Yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu," sambungnya.

NASIONAL

Putusan Mahkamah Konstitusi soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Oleh Redaksi · 12 Okt, 13.14 WIB



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera kini memasuki ranah sosial dan Politik.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, MK telah menyatakan tidak ditemukan dokumen yang membuktikan kelulusan Gibran dari jenjang pendidikan SMA.

"PKS melihat, MK telah menyatakan tidak ditemukan dokumen yang membuktikan kelulusan SMA. Kini, respons atas putusan tersebut memasuki ranah sosial dan politik," kata Mardani, Senin, 12 Oktober 2026.

Putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan

bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Namun, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum sehingga putusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut Mardani, masyarakat dan partai politik memiliki hak untuk menyampaikan sikap terhadap putusan tersebut.

"Masyarakat dan parpol berhak menyampaikan sikap. PKS terus berkomunikasi demi solusi terbaik untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.

NASIONAL

Putusan MK Tak Bakal Berubah meski Protes Guling-guling

Oleh Redaksi · 12 Okt, 10.30 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat final dan mengikat (final and binding).

Menurut Pengamat Politik Adi Prayitno, berbagai protes terhadap putusan tersebut tidak akan mengubah keputusan yang telah dijatuhkan MK. Karena itu, perdebatan mengenai perkara tersebut semestinya disampaikan saat proses persidangan berlangsung.

"Putusan MK final & binding. Mau guling-guling, mau nyungsap nyungsep, mau nangis kejer-kejer, nggak bakal bisa mengubah itu putusan," ujar Adi, Senin, 12 Oktober 2026.

Ia kemudian membandingkan perkara tersebut dengan Putusan

MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

"Putusan MK 90 juga begitu dulu, sekarang soal ijazah juga sama. MK mau bayar utang masa lalu kayaknya," kata Adi.

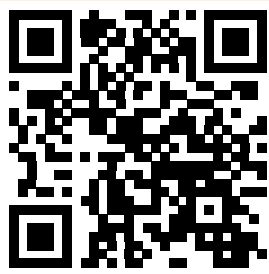
Putusan MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Namun, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum sehingga putusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

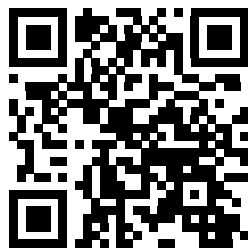
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mahfud MD Sebut 9 Orang Bisa Dipidana dalam Perkara Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 12 Okt, 09.02 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut sembilan orang berpotensi dipidana bersama-sama dalam perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jika ditemukan unsur tindak pidana.

Mahfud menjelaskan, putusan MK yang menyatakan permohonan terkait perkara tersebut tidak dapat diterima bukan berarti persoalan hukum telah berakhir. Menurut dia, masih ada jalur hukum lain yang dapat ditempuh, mulai dari proses pidana hingga pemakzulan (impeachment).

"9 orang itu bisa, bisa diduga telah melakukan tindak pidana bersama-sama," ujar Mahfud dalam wawancara bersama Rosi, Kamis (8/10/2026).

Ia menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persoalan tersebut. Selain itu, pihak di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga dapat diperiksa apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam proses yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.

Mahfud menjelaskan, sejak awal dirinya menilai persoalan tersebut tidak tepat diselesaikan dengan mendiskualifikasi Gibran setelah proses pemilihan selesai. Menurut dia, pembatalan pencalonan setelah hasil pemilihan ditetapkan dapat menjadi preseden buruk bagi ketatanegaraan.

Karena itu, ia berpandangan persoalan tersebut perlu diarahkan pada putusan deklaratif, yakni pernyataan mengenai suatu keadaan

hukum, tanpa serta-merta menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi.

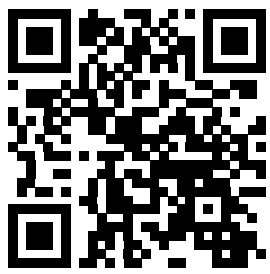
Mahfud juga menyinggung kemungkinan Gibran diperiksa apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan dalam pemberian keterangan atau penggunaan dokumen yang bermasalah. Meski demikian, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Ia menegaskan, jalur pidana dan proses pemakzulan memiliki mekanisme tersendiri. Dengan demikian, putusan MK yang tidak menerima permohonan tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya proses hukum lain jika ditemukan dasar yang memenuhi ketentuan

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Syech Muharram: Jangan Sampai Anak Aceh Tak Bisa Berbahasa Aceh

Oleh Redaksi · 12 Okt, 21.47 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO — Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian bahasa Aceh agar tidak kehilangan tempat di tengah kehidupan generasi muda. Menurutnya, bahasa daerah merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya yang perlu dijaga bersama.

Pesan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Syech Muharram saat membuka Festival Piasan Aceh Rayeuk 2026 di halaman Kantor Camat Peukan Bada, Senin (12/10/2026).

“Jangan sampai anak Aceh tidak bisa berbicara bahasa Aceh. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama agar bahasa dan budaya Aceh tetap terjaga serta diwariskan kepada generasi berikutnya,” kata Syech Muharram.

Ia mengatakan, pelestarian bahasa dan budaya Aceh membutuhkan keterlibatan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penggunaan bahasa Aceh dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah,

dinilai penting agar anak-anak terbiasa menggunakan bahasa daerahnya.

Syech Muharram juga menyampaikan keprihatinan terhadap sebagian generasi muda yang mulai kurang fasih, bahkan merasa malu berbicara dalam bahasa Aceh. Karena itu, upaya pelestarian perlu diperkuat melalui pendidikan, pembiasaan di rumah, serta kegiatan kebudayaan yang melibatkan generasi muda.

Selain bahasa, ia menekankan bahwa kebudayaan Aceh berkaitan erat dengan nilai-nilai syariat Islam. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya sebatas mempertahankan kesenian atau menyelenggarakan festival, tetapi juga menjaga adat, adab, dan tata kehidupan yang diwariskan para leluhur.

“Budaya kita tidak terlepas dari hukum syariah. Adat dan hukum itu ibarat zat dan sifat, tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Syech Muharram turut menyoroti perubahan dalam sejumlah tradisi dan tata krama masyarakat,

mulai dari prosesi pertunangan hingga kebiasaan makan dan cara menghormati orang yang lebih tua.

Ia mengingatkan bahwa perubahan zaman seharusnya tidak membuat masyarakat meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas orang Aceh. Pendidikan adab, menurutnya, perlu terus diberikan kepada anak-anak agar nilai budaya tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Tata cara makan sudah tidak sama lagi dengan budaya pendahulu kita. Budaya menghargai orang yang lebih tua juga sudah jauh dari yang semestinya,” ungkapnya.

Dorong Perlindungan Warisan Budaya Aceh Besar

Dalam kesempatan itu, Syech Muharram juga menekankan pentingnya melindungi kekayaan budaya Aceh Besar, termasuk kuliner tradisional kuah beulangong yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar menindaklanjuti upaya perlindungan kekayaan intelektual atas warisan budaya tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kuah beulangong merupakan budaya khas Aceh Besar. Saya minta Disdikbud dan Bappeda tolong hak paten diurus, karena sudah banyak yang menjadi khazanah kita dipergunakan hak miliknya oleh daerah lain,” kata Syech Muharram.

Ia menjelaskan, kekayaan budaya Aceh Besar meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian, kuliner, hingga adab dalam kehidupan masyarakat. Seluruh unsur tersebut perlu dirawat dan dikembangkan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

Wagub Dek Fadh Terima Audiensi Kepala Perwakilan BI Aceh

Oleh Redaksi · 12 Okt, 16.22 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, beserta jajaran, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (12/10/2026).

Audiensi tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia, dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya pengembangan UMKM serta berbagai agenda kolaborasi di Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Dek Fadh menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh terbuka untuk memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, “kita berharap sinergi ini terus diperkuat sehingga dapat

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan UMKM dan perekonomian Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Aceh, Agus Chusaini, turut menyampaikan sejumlah agenda kolaborasi yang akan dilaksanakan bersama Pemerintah Aceh, termasuk kegiatan Meuseuraya Festival 2026 sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan UMKM dan promosi potensi daerah.

Melalui audiensi tersebut, diharapkan kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia dapat terus diperkuat dan ditindaklanjuti melalui berbagai program yang memberikan dampak nyata bagi pengembangan UMKM dan perekonomian Aceh.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

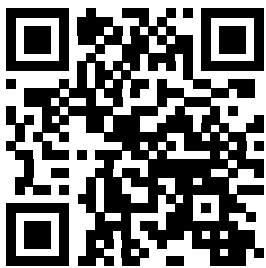
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Sekda Sabang Tinjau Penyaluran Zakat dan Infak, 30 Warga Dapat Bantuan Rumah

Oleh Redaksi · 12 Okt, 15.47 WIB



BANDA ACEH, SABANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sabang, Andri Nourman, meninjau pelaksanaan penyaluran zakat dan infak masa haul 2025 Tahun Anggaran 2026 bagi masyarakat yang berhak menerima. Program tersebut juga mencakup bantuan pembangunan 30 unit rumah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Peninjauan dilakukan di Kantor Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, Senin (12/10/2026). Andri didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang, Mawardi, dan Pemimpin Bank Aceh Cabang Sabang, Habibie.

Penyaluran zakat dan infak tersebut dilaksanakan melalui Bank Aceh Syariah Cabang Sabang dan sejumlah kantor cabang pembantu (Capem). Layanan di kantor cabang utama mencakup tiga gampong, yakni Kota Ateuh, Kuta Barat, dan Kuta Timur. Sementara itu, masyarakat dari Gampong Cot Ba'u, Cot Abeuk, dan Balohan dilayani melalui kantor cabang pembantu.

Andri mengatakan, proses penyaluran pada Senin pagi berjalan lancar. Meski sempat ramai, antrean panjang dapat dihindari berkat antisipasi dan kesiapan petugas Bank Aceh Syariah.

“Alhamdulillah, semuanya dapat berjalan dengan baik. Tidak ada antrean panjang, walaupun mungkin tadi pagi agak sedikit ramai. Tapi, teman-teman Bank Aceh ini sudah mengantisipasinya sehingga penyalurannya, segala administrasi, segala macam dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Bank Aceh Syariah yang telah mendukung kelancaran penyaluran zakat dan infak kepada masyarakat penerima manfaat.

Adapun penyaluran zakat menyasar tiga kelompok penerima. Sebanyak 672 kepala keluarga dari senif fakir menerima bantuan masing-masing Rp800.000, sedangkan 1.676 kepala keluarga dari senif miskin memperoleh Rp500.000 per penerima.

Bantuan juga diberikan kepada kelompok senif fisabilillah, yakni

464 guru TPA/TPQ, guru diniyah, dan balai pengajian. Masing-masing penerima memperoleh Rp307.300.

Selain penyaluran zakat, dana infak dialokasikan untuk pembangunan 30 unit rumah dengan anggaran Rp120 juta per unit. Dengan demikian, total anggaran pembangunan rumah tersebut mencapai Rp3,6 miliar.

Andri menjelaskan, penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan kategori dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebelum penyaluran, Baitul Mal Kota Sabang telah melaksanakan tahapan administrasi, termasuk pengecekan langsung ke lapangan, verifikasi, dan penilaian terhadap calon penerima bantuan pembangunan rumah.

Ia menambahkan, pencairan bantuan pembangunan rumah tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan.

“Penyalurannya sendiri nanti ini ada beberapa tahapan. Artinya, penerima ini tidak langsung mendapatkan full Rp120 juta. Artinya,

beberapa progres yang berlangsung di lapangan, di kisaran angka tersebut nanti akan disalurkan melalui Bank Aceh,” jelasnya.

Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, Baitul Mal Kota Sabang bersama tim teknis akan terus memantau perkembangan pekerjaan hingga rumah selesai dibangun.

Andri berharap, bantuan zakat dan infak tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok fakir, miskin, fisabilillah, serta penerima bantuan pembangunan rumah.

“Mudah-mudahan apa yang disalurkan ini benar-benar memberikan manfaat besar, terutama bagi penerima dari golongan fakir, miskin, dan fisabilillah, serta penerima bantuan rumah. Semoga semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh keluarga,” tutupnya.[]

ACEH

Sekda Aceh Besar Ajak ASN, Keuchik, dan Masyarakat Sukseskan MTQ ke-35

Oleh Redaksi · 12 Okt, 15.47 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO — Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Besar, Bahrul Jamil, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat sipil negara (ASN), kepala sekolah, keuchik, dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar yang akan digelar di Kecamatan Kuta Baro pada 24–31 Oktober 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Bahrul Jamil saat memimpin rapat persiapan yang diikuti para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) dan kepala OPD di Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Senin (12/10/2026).

Bahrul Jamil mengatakan, MTQ ke-35 akan diikuti para qari dan qariah dari 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Menurut rencana, pembukaan MTQ akan dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Besar di Lapangan Sepak Bola Gampong Seupeu, Kemukiman Bueng Cala, Kecamatan Kuta Baro, pada Sabtu malam (24/10/2026).

“Menurut rencana, MTQ ke-35 ini akan dibuka langsung oleh Bupati Aceh Besar di lapangan Sepakbola Gampong Seupeu, Kemukiman Bueng Cala, Kecamatan Kuta Baro, Sabtu malam (24/10/2026). Mari kita syiarkan dan sukseskan MTQ ke-35 ini,” ajak Bahrul Jamil.

Untuk mendukung sosialisasi kegiatan tersebut, Bahrul Jamil mengimbau kepala OPD terkait agar menginstruksikan jajarannya memasang spanduk atau baliho MTQ ke-35 di lingkungan kerja masing-masing.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat mengimbau kepala sekolah tingkat

taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) untuk memasang spanduk atau baliho di sekolah masing-masing.

Hal serupa juga diharapkan dilakukan Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong agar informasi pelaksanaan MTQ semakin luas diketahui masyarakat.

“Kita juga mengajak OPD dan ASN untuk melaksanakan gotong royong guna menyukseskan kegiatan islami tersebut,” kata Bahrul Jamil.

Menjelang pelaksanaan MTQ, suasana persiapan mulai terlihat di Kecamatan Kuta Baro dan sejumlah kecamatan lainnya di Aceh Besar. Spanduk dan baliho telah terpasang di berbagai lokasi strategis, perkantoran, sekolah, dan gampong.

Persiapan kafilah peserta juga terus dilakukan, di antaranya melalui kegiatan pemusatan latihan atau training center (TC) di masing-masing kecamatan. Ratusan qari dan qariah terbaik dari seluruh Aceh Besar dipastikan akan mengikuti perlombaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Besar, Rusdi, mengatakan panitia telah menetapkan sembilan arena perlombaan untuk MTQ ke-35.

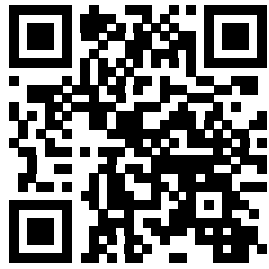
Cabang yang diperlombakan meliputi Tilawah, Fahmil Quran, Tartil Quran, Khatil Quran, KTQ, Tafsir Quran, dan Qiraah Sab'ah.

“MTQ ke-35 Tingkat Kabupaten Aceh Besar tahun 2026 ini akan diikuti qari dan qariah terbaik dari 23 kecamatan yang ada di Aceh Besar. Insya Allah, dukungan kita semua akan sangat diharapkan untuk suksesnya acara MTQ ke-35,” ujar Rusdi.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

4 BERITA

INTERNASIONAL

Houthi Peringatkan Pelancong Hindari Bandara-Bandara Saudi: Itu Target Serangan Kami!

Oleh Redaksi · 12 Okt, 08.58 WIB



BANDA ACEH - - Kelompok Houthi Yaman memperingatkan maskapai penerbangan, pelancong, dan pekerja agar menjauhi bandara-bandara Arab Saudi. Kelompok yang didukung Iran itu menegaskan bandara dan wilayah udara Saudi rentan terhadap serangan dan telah menjadi arena operasi militer mereka.

Peringatan keras tersebut disampaikan pada Minggu (11/10/2026), sehari setelah serangan Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya.

Houthi juga mendesak semua pihak menanggapi peringatan tersebut dengan serius. Mereka secara khusus mengecualikan bandara di Kota Makkah dan Madinah dari imbauan untuk menghindari bandara-bandara Saudi.

"Kami memperbarui peringatan kepada semua maskapai, tenaga ahli, pegawai, pekerja, dan pelancong untuk tidak menggunakan bandara dan wilayah udara Arab Saudi, karena tempat-tempat ter-

sebut rentan terhadap serangan dan telah menjadi arena operasi pasukan kami, kecuali bandara di Kota Makkah dan Madinah," bunyi pernyataan kelompok Houthi, seperti dikutip dari Reuters, Senin (12/10/2026).

"Kami mendesak semua pihak untuk merespons peringatan kami dengan serius, dan Arab Saudi memikul tanggung jawab atas setiap upaya pencegahan yang gagal."

Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid tersebut menjadi serangan Houthi paling mematikan di wilayah Saudi dalam lebih dari 10 tahun. Gempuran itu berlangsung di tengah meningkatnya pertempuran antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi.

Dari 12 korban tewas dalam serangan pada Sabtu sore waktu setempat, empat orang merupakan warga Saudi. Delapan korban lainnya berasal dari Amerika Serikat (AS), Bangladesh, Mesir, Yordania, dan Sudan.

Ancaman Meluas ke Bandara Dammam

Ancaman terhadap infrastruktur penerbangan Saudi juga muncul di wilayah timur negara tersebut. Koalisi pimpinan Arab Saudi melaporkan sebuah proyektil jatuh di dekat Bandara Internasional King Fahd di Dammam, Provinsi Timur.

Koalisi tersebut juga menyatakan telah mencegat sebuah drone di wilayah itu pada Minggu. Namun, belum ada keterangan dalam laporan tersebut yang memastikan proyektil dan drone itu merupakan bagian dari serangan yang sama dengan gempuran terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh.

Perkembangan ini menambah kekhawatiran terhadap keamanan penerbangan di Arab Saudi setelah Houthi secara terbuka memperingatkan maskapai dan pelancong agar tidak menggunakan bandara maupun wilayah udara negara tersebut.

Trump Pertimbangkan Berga-

bung dalam Serangan terhadap Houthi

Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden AS Donald Trump mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan untuk bergabung dalam serangan Arab Saudi terhadap kelompok Houthi.

Pernyataan tersebut membuka kemungkinan keterlibatan langsung AS dalam operasi militer Saudi terhadap kelompok yang berbasis di Yaman itu. Namun, belum ada keputusan final mengenai langkah yang akan diambil Washington.

Eskalasi ini berlangsung di tengah konflik berkepanjangan di Yaman, yang melibatkan kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi.

Peringatan Houthi terhadap bandara-bandara Saudi serta kemungkinan keterlibatan AS menambah dimensi baru dalam ketegangan regional, terutama terkait keamanan penerbangan dan risiko serangan lanjutan terhadap infrastruktur penting

INTERNASIONAL

Setelah Bandara King Khalid Riyadh, Houthi Gempur Bandara King Fahd Saudi

Oleh Redaksi · 12 Okt, 13.23 WIB



BANDA ACEH - Serangan Houthi terhadap bandara di Arab Saudi meluas ke Bandara King Fahd, Dammam, Minggu (11/10/2026). Meski demikian belum ada laporan korban akibat serangan itu.

Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi GACa menyatakan, Bandara Internasional King Fahd terkena serangan, menyebabkan kerusakan properti.

GACA masih memeriksa kerusakan yang ditimbulkan. Pihak berwenang juga memeriksa keamanan fasilitas bandara serta ber-

koordinasi dengan lembaga terkait.

Di hari yang sama, Houthi kembali menyerang Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, menewaskan satu orang, yakni warga Pakistan, serta melukai 11 lainnya.

Sehari sebelumnya, serangan brutal kelompok yang didukung Iran itu di tempat yang sama, menewaskan 13 orang, termasuk 4 warga Saudi serta warga Amerika Serikat (AS) dan Palestina. Serangan itu juga melukai lebih dari 300 orang, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis

INTERNASIONAL

Detik-Detik Jemaah Umrah Terkena Serangan Houthi di Bandara Riyadh Saudi

Oleh Redaksi · 12 Okt, 08.48 WIB



BANDA ACEH - Rekaman video yang dirilis stasiun televisi Alarabiya mengungkap detik-detik serangan kelompok HouthiYaman terhadap Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Serangan itu mengenai jemaah umrah yang sedang antre dan menunggu pesawat di bandara tersebut.

Satu rekaman yang diambil dari CCTV bandara menunjukkan, para jemaah yang telah mengenakan pakaian ihram sedang duduk di ruang tunggu, menunggu boarding. Beberapa saat kemudian terdengar suara ledakan keras disertai asap putih tebal dan beberapa benda jatuh dari atap.

Video lain menunjukkan jemaah umrah yang telah mengenakan pakaian ihram sedang antre untuk boarding, kemudian terdengar ledakan keras dan asap putih tebal. Mereka berlarian menyelamatkan diri.

Saudi Gazette melaporkan, serangan Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid mem-

buktikan bahwa kelompok tersebut melakukan kekerasan terhadap Arab Saudi ke level baru yang berbahaya, mengancam para jemaah umrah, keluarga, dan warga sipil. Sebelumnya Houthi juga menyerang langsung ke Dua Kota Suci, Makkah dan Madinah.

Rekaman video yang beredar menunjukkan bahaya yang ditimbulkan bagi para jemaah yang tidak bersalah. Mereka dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah di tempat suci, namun menghadapi bahaya.

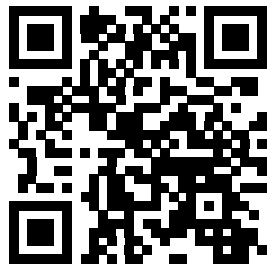
Bagi jutaan umat Islam seluruh dunia, bandara-bandara Arab Saudi lebih dari sekadar pusat transportasi, namun juga gerbang menuju Makkah dan Madinah.

Serangan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut menimbulkan dampak yang lebih besar daripada sekadar gangguan lalu lintas udara. Serangan itu membahayakan nyawa para jemaah dan warga sipil

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

Bandara Riyadh Kembali Diserang, Video Persiapan Jamaah Umrah Jadi Sorotan

Oleh Redaksi · 12 Okt, 08.44 WIB



BANDA ACEH -Media Al Arabiya merilis video yang memperlihatkan persiapan jamaah umrah sebelum menaiki pesawat di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi.

Rekaman tersebut menjadi sorotan di tengah serangan susulan yang kembali mengguncang bandara itu pada Minggu, 11 Oktober 2026, waktu setempat.

Video yang diunggah melalui media sosial X tersebut memperlihatkan suasana menjelang keberangkatan para jamaah, ketika tiba-tiba terlihat ada ledakan.

Laporan BBC yang dikutip Senin, 12 Oktober 2026, menyebutkan satu orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan terbaru di bandara tersebut.

Juru bicara militer Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki al-Maliki,

mengatakan pertahanan udara negara itu telah mencegat sebuah rudal di sekitar bandara. Sementara itu, petugas menangani kebakaran di Terminal 4 yang dilaporkan dipicu oleh proyektil tak dikenal.

Serangan susulan tersebut terjadi sehari setelah serangan sebelumnya di bandara yang sama menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 309 lainnya. Jumlah korban tewas kemudian bertambah menjadi 13 orang setelah seorang warga negara India yang terluka meninggal dunia.

Korban berasal dari sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Yordania, Palestina, Suriah, Sudan, dan Mesir. Serangkaian serangan itu turut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselama-

tan penumpang dan kelancaran penerbangan di ibu kota Arab Saudi tersebut.

Kelompok Houthi di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangkaian serangan tersebut. Juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengatakan kelompoknya menggunakan kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, dan drone untuk menyerang sejumlah sasaran di Arab Saudi, termasuk bandara dan fasilitas minyak.

Houthi juga memperingatkan bahwa bandara-bandara di Arab Saudi berpotensi menjadi sasaran serangan, kecuali bandara di Makkah dan Madinah.

Kelompok tersebut mengaitkan serangan dengan dukungan Arab Saudi terhadap pasukan pemerintah Yaman dalam perang saudara

serta operasi militer terhadap wilayah yang dikuasai Houthi.

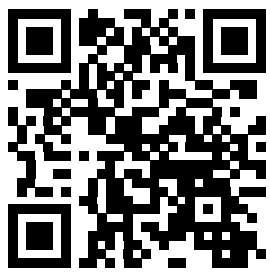
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington akan segera mengambil keputusan terkait kemungkinan tindakan militer terhadap Houthi. Perkembangan ini menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Hingga Senin, 12 Oktober 2026, belum ada kepastian mengenai dampak langsung serangan terbaru terhadap jamaah umrah yang terlihat dalam video Al Arabiya. Informasi mengenai kondisi penumpang dan operasional penerbangan perlu merujuk pada pembaruan resmi otoritas bandara dan maskapai terkait.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

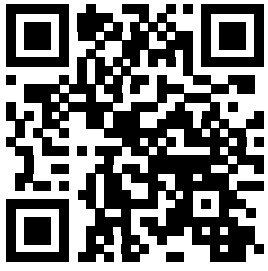
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

4 BERITA

EKONOMI

DKP Aceh dan USK Jajaki Kolaborasi Hilirisasi Industri Pengolahan Ikan

Oleh Hamdani · 12 Okt, 21.47 WIB



Fitriani, S.Pi., M.Si. dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menyampaikan materi hilirisasi produk perikanan dan penerapan teknologi tepat guna kepada mahasiswa Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Syiah Kuala (USK) dalam kegiatan kuliah tamu di Museum Mesin Kuno Industri (Mektri), kawasan Pelangahan, Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya

BANDA ACEH - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh bersama Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Syiah Kuala (USK) mendorong penguatan hilirisasi industri pengolahan hasil perikanan melalui inovasi produk, penerapan mekanisasi, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan kuliah tamu yang diikuti mahasiswa Teknik Industri USK di Museum Mesin Kuno Industri (Mektri), kawasan Pelangahan, Banda Aceh, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara Program Studi S1 Teknik Industri USK dan DKP Aceh sekaligus pengayaan materi perkuliahan mengenai perancangan produk dan wawasan industri.

Dalam kegiatan tersebut, Fitriani, S.Pi., M.Si., dari DKP Aceh memaparkan peluang pengembangan produk perikanan lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi melalui pengolahan, diversifikasi produk,

peningkatan mutu, pengemasan, serta efisiensi proses produksi. Potensi perikanan Aceh, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya, dapat dikembangkan menjadi beragam produk olahan, seperti keumamah, bakso ikan, nugget, dan produk siap masak lainnya. Pengembangan produk tersebut perlu didukung proses produksi yang efisien, standar mutu yang konsisten, serta penggunaan peralatan yang sesuai dengan skala dan kebutuhan usaha. Fitriani menilai, ilmu Teknik Industri memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan industri pengolahan perikanan, mulai dari perancangan produk, pemilihan peralatan, optimalisasi kapasitas produksi, hingga pengendalian kualitas dan efisiensi biaya. Ia juga mendorong mahasiswa agar tidak hanya mengembangkan pengetahuan di lingkungan akademik, tetapi turut mengambil peran dalam mendampingi pelaku usaha di tengah masyarakat, khususnya

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolahan hasil perikanan. “Mahasiswa memiliki peluang besar untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat. Ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dapat diterapkan untuk membantu pelaku usaha mengenal dan menggunakan peralatan yang tepat, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta menjaga kualitas dan keamanan produk. Mekanisasi tidak harus selalu menggunakan teknologi yang mahal, tetapi perlu disesuaikan dengan skala usaha, kemampuan pelaku usaha, dan kebutuhan produksi,” ujarnya. Menurut Fitriani, pendampingan berbasis kebutuhan tersebut diharapkan membantu UMKM perikanan meningkatkan produktivitas, menjaga konsistensi mutu, dan memperkuat daya saing produk. Keterlibatan mahasiswa juga berpotensi membuka ruang penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha.

Sementara itu, Ketua Program Studi S1 Teknik Industri USK, Suhendrianto, S.T., M.Sc., menyampaikan bahwa kegiatan kuliah tamu tersebut diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih konkret antara perguruan tinggi dan DKP Aceh. Kolaborasi ke depan diarahkan pada penguatan hilirisasi industri pengolahan ikan yang kompetitif dan berkelanjutan melalui penelitian terapan bersama mahasiswa, akademisi, dan praktisi. “Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pengayaan materi perkuliahan, tetapi dapat berlanjut menjadi kolaborasi nyata melalui penelitian terapan yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan praktisi. Dengan begitu, ilmu Teknik Industri dapat memberikan kontribusi langsung dalam mendukung mekanisasi, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat daya saing UMKM pengolahan ikan di Aceh,” ujar Suhendrianto. » Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

HIBURAN

Istri di Sampang Digerebek Suami saat Berduaan dengan Kepala Puskesmas di Ruang Kerja

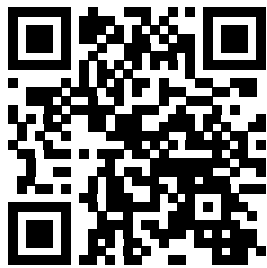
Oleh Redaksi · 12 Okt, 13.27 WIB



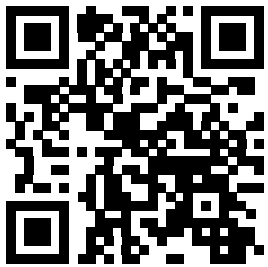
BANDA ACEH - Kepala Puskesmas Robatal berinisial B dan seorang staf berinisial IA dibawa ke Polres Sampang, Madura, Jawa Timur, setelah terjadi penggerebekan di ruang kerja kepala puskesmas. Penggerebekan itu dilakukan oleh suami IA pada Kamis (8/10/2026), dengan didampingi anggota Polsek Robatal dan Bhabinsa. Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, saat penggerebekan berlangsung, B dan IA diketahui berada di dalam ruang kerja kepala Puskesmas Robatal. “Salah satu staf di puskesmas tersebut berada di ruang oknum kapus di salah satu puskesmas di Kabupaten Sampang,” ujar AKP Eko. Polisi kemudian membawa keduanya ke Polres Sampang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, penyidik masih mendalami peristiwa tersebut dan mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait.

“Untuk hal yang terjadi, apakah itu perselingkuhan apakah hal-hal yang tidak diinginkan masih pendalaman dan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Sampang,” ucapnya. Sementara itu, kuasa hukum B, Jakfar Sodik belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh karena kliennya masih menjalani pemeriksaan polisi. Dia mengatakan, akan menyampaikan perkembangan kasus setelah proses pemeriksaan selesai. Jakfar juga menegaskan bahwa kliennya saat ini masih berstatus sebagai saksi. “Saat ini saya belum bisa memberikan komentar yang banyak karena klien kami masih periksa sebagai saksi di Polres Sampang dan saat ini juga pihak perempuan masih dalam pemeriksaan,” kata Jakfar. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terhadap B dan IA. Polisi masih mendalami kronologi serta fakta di balik penggerebekan tersebut

BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id
Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Apa Urgensinya Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?

Oleh Redaksi · 12 Okt, 16.05 WIB



Oleh: Tarmidzi Yusuf,((Kolumnis))

PA iya Anies Baswedan mau jadi menterinya Prabowo? Pertanyaan ini muncul setelah mantan relawan Anies Baswedan yang saat ini jadi Juru Bicara Pemerintahan Prabowo, Syahganda Nainggolan mendorong Anies Baswedan menerima jika ada tawaran jadi menterinya Prabowo.

Penulis sendiri termasuk orang yang tidak yakin Anies Baswedan mau menerima tawaran tersebut. Jika ada tawaran tentunya. Pasalnya, rekam jejak Anies Baswedan ketika Pilpres 2024 membuat penulis yakin Anies Baswedan tidak akan menerima tawaran tersebut.

Keyakinan penulis didasari jejak digital Anies Baswedan pasca Pilpres 2024 lalu. Seperti dikutip dari beberapa media mainstream pertengahan Maret 2024, Anies Baswedan meminta semua pihak yang kalah dalam Pemilu 2024 termasuk partai Politik untuk berada di luar pemerintahan menjadi oposisi.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016 dan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan, “Pihak yang berada di dalam pemerintahan sepatutnya diisi oleh partai-partai dan orang-orang yang memenangkan Pemilu.”

Mengutip penegasan Anies Baswedan dari beberapa media dalam keterangannya di Jakarta Foreign Correspondents Club, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

“Saya pegang prinsip itu saja. Prinsip itu yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan dan dua-duanya sama-sama penting.”

Dalam Debat Capres 2024 ketika berhadapan dengan Prabowo Subianto. Anies Baswedan sempat menyentuh topik ini secara langsung.

“Jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi,” kata Anies Baswedan yang disambut aplaus meriah dari penonton debat dan viral di berbagai platform media sosial.

Pernyataan Anies Baswedan tersebut merujuk pada fenomena politisi atau partai politik yang langsung mendekat ke penguasa setelah pemilu selesai karena tidak tahan berbisnis atau bergerak tanpa kekuasaan.

Anies Baswedan adalah contoh politisi Indonesia yang teguh dalam memegang prinsip. Menurut penulis, Anies Baswedan bukan tipe politisi pragmatis yang mengorbankan pendukungnya demi ambisi politik sesaat. Bagi Anies Baswedan rakyat nomor satu.

Sepengetahuan penulis hal-hal yang kecil saja Anies Baswedan selalu memperhatikannya. Sering sekali kita mendengar ucapan Anies Baswedan melalui media sosial. Bahwa Anies Baswedan tidak mudah berjanji. Contohnya adalah ucapan Anies Baswedan yang terkenal itu, “Lebih baik bertemu mendadak daripada mendadak batal.”

Apalagi tentang komitmen berbangsa dan bernegara. Termasuk komitmen politik. Penulis melihat Anies Baswedan lebih menguta-

makan adab dan akhlaq berpolitik daripada sekadar ambisi kekuasaan. Menteri bukan tujuan bagi Anies Baswedan. Kesejahteraan rakyat dan keadilan yang lebih utama bagi Anies Baswedan untuk diperjuangkan.

Berdasarkan literasi yang penulis baca. Anies Baswedan memandang mewujudkan janji kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 jauh lebih besar dan urgent dari sekadar kepentingan politik sesaat untuk berkuasa.

Rasa-rasanya kecil kemungkinan Anies Baswedan bergabung jadi menterinya Prabowo seperti yang diharapkan oleh Syahganda Nainggolan.

Bagi Anies Baswedan menunaikan janji dan komitmen saat Pilpres 2024 seperti ucapannya, “Jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi,” merupakan ciri utama kepribadian Anies Baswedan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

LINGKUNGAN

Polri Kerahkan 300 Personel Brimob, Ratusan Warga Terdampak Banjir di Padang Dievakuasi

Oleh Redaksi · 12 Okt, 08.35 WIB



BANDA ACEH, PADANG – Polri mengerahkan 300 personel Satuan Brimob Polda Sumatera Barat untuk membantu penanganan banjir dan mengevakuasi warga terdampak akibat curah hujan tinggi di Kota Padang, Sumatera Barat. Hingga Minggu (11/10/2026), personel masih bersiaga dan melanjutkan evakuasi di sejumlah lokasi terdampak.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengerahan personel Brimob merupakan bentuk respons cepat Polri untuk membantu masyarakat, terutama menyelamatkan warga yang terjebak banjir dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman.

“Polri mengerahkan personel beserta peralatan pendukung untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir. Prioritas utama adalah keselamatan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pertolongan untuk keluar dari kawasan terdampak menuju tempat yang lebih aman,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Sebanyak 300 personel Satbrimob Polda Sumbar dipimpin Dan-satbrimob Polda Sumbar Kombes Pol. Lukman Syafri Dandel Malik. Personel dibagi menjadi tiga tim yang ditempatkan di Perumahan Lumin Park, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah; Dadok Tunggul Hitam; dan Guo Kuranji, Kota Padang.

Berdasarkan laporan penanganan di lapangan, petugas telah mengevakuasi sekitar 300 warga dari Perumahan Lumin Park. Sementara itu, di kawasan Guo Kuranji, personel mengevakuasi 30 warga dari wilayah terdampak banjir.

Petugas juga terus memantau kondisi di sejumlah lokasi untuk memastikan warga yang masih membutuhkan bantuan dapat segera memperoleh pertolongan.

Untuk mendukung proses penyelamatan, Satbrimob Polda Sumbar mengerahkan berbagai peralatan pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR), antara lain perahu karet, mesin tempel, pelampung, helm SAR, tali karmantel, karabiner, katrol, dan body harness.

Selain peralatan penyelamatan, Polri mengoperasikan kendaraan pendukung berupa truk pengangkut personel, bus, kendaraan khusus SAR, serta kendaraan operasional lainnya. Kendaraan tersebut digunakan untuk mobilisasi personel, pengangkutan perlengkapan, dan mendukung penanganan banjir di sejumlah titik.

Di Perumahan Lumin Park, salah satu lokasi utama penanganan, personel mendirikan posko SAR di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Sementara itu, tim yang ditempatkan di Dadok Tunggul Hitam dan Guo Kuranji disiagakan untuk memberikan bantuan sesuai kondisi di lapangan.

Trunoyudo menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya pertolongan dan berkoordinasi dengan unsur terkait dalam menangani dampak banjir. Selain evakuasi, pemantauan kondisi wilayah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak juga menjadi perhatian.

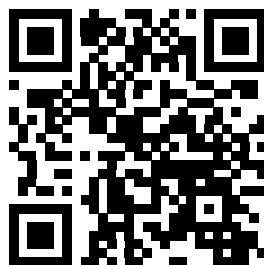
“Personel di lapangan terus melaksanakan tugas kemanusiaan dengan mengutamakan keselamatan warga. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengikuti arahan petugas, dan segera mencari tempat yang lebih aman apabila kondisi di sekitar tempat tinggal membahayakan,” tutupnya.

Hingga Minggu (11/10/2026), personel Satbrimob Polda Sumbar masih melanjutkan evakuasi dan penanganan warga terdampak banjir di wilayah hukum Polresta Padang.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

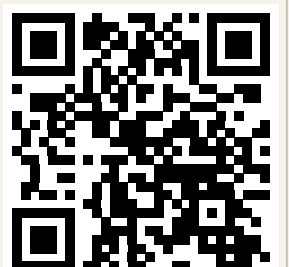
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia